

DE
MO
KRA
SIKU
RANG
AJAR

DEMOKRASI selalu saja identik dengan kebebasan. Dalam praktiknya sebagian oknum politisi menafsirkan kebebasan ini dalam perspektif yang cukup liberal, di mana penghalalan segala cara di pentas demokrasi telah dianggap wajar, untuk tidak menyebut sebuah keharusan dan strategi paling efektif untuk duduk di tampuk kekuasaan.

Buku ini mencoba menggambarkan berbagai trik dan intrik yang diperankan oleh oknum tertentu dalam realitas demokrasi kita, khususnya dalam konteks kekinian. Apa yang tersaji dalam buku ini sebagiannya mungkin telah kita saksikan, rasakan atau perankan bersama. Ditulis dengan pendekatan bahasa yang sedikit sarkas dan satir mengikut gejolak rasa si penulis. Oleh sebab itu buku ini layak dibaca politisi, tim sukses dan bahkan masyarakat umum.

Cara terbaik membaca buku ini adalah dengan pola santai tanpa perlu mengernyitkan dahi.

Demokrasi “Kurang Ajar”

Khairil Miswar



Demokrasi “Kurang Ajar”

Yogyakarta: Zahir Publishing, Maret 2019

ISBN : 978-602-5541-61-2

Penulis : Khairil Miswar

Tata letak : Darisman

Design cover : Ityan Jauhar

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

0857 2589 4940 E: zahirpublishing@gmail.com

© zahir publishing

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Untuk Kalian Semua

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik idola bagi umat manusia.

Alhamdulillah buku dengan tajuk “Demokrasi Kurang Ajar” ini selesai juga saya tulis. Semuanya berkat karunia Allah dan juga usaha kecil-kecilan yang saya lakukan selama lebih kurang tujuh bulan. Dengan demikian sekali lagi saya mengucapkan syukur yang tiada henti-hentinya.

Buku ini berisi tulisan-tulisan pendek yang saya tulis secara santai sambil minum kopi, sambil makan pisang goreng, sambil nonton TV, sambil dengar musik, sambil berdiskusi, sambil tiduran dan sambil malas-malasan. Sebagian tulisan ini saya kerjakan di rumah dan sebagian lainnya di luar rumah seperti di tempat kerja, terminal, bus umum, kedai kopi, pematang sawah, tepi pantai, atas bukit, pinggir jalan dan emperan toko.

Karena ditulis dalam kondisi sedemikian rupa, maka hasil tulisan ini pun berupa-rupa warnanya, modelnya dan gayanya. Dengan demikian, para pembaca diharapkan untuk tidak membaca buku ini secara serius, apalagi sangat serius. Buku yang ditulis dalam kondisi santai tentunya harus dibaca

dalam kondisi santai pula tanpa perlu mengernyitkan dahi. Jangan!

Tulisan-tulisan dalam buku ini lahir dari hasil “ijtihad” pribadi setelah saya melihat, mendengar dan merasakan sendiri kondisi demokrasi kita saat ini. Meskipun berbicara tentang demokrasi, namun dalam buku ini pembaca tidak akan menemukan teori-teori demokrasi atau pun teori politik dari ahli mana pun, sebab buku ini tidak bermaksud mengurai teori dan pemikiran ahli yang terkesan akademis itu.

Buku ini bukan produk akademis, tapi hanya usaha kecil-kecilan dari seorang hamba yang *dha'if* dalam melihat realitas demokrasi kita yang entah sadar atau tidak telah melahirkan berbagai bentuk “kekurangajaran” oleh oknum-oknum tertentu. Meskipun dituliskan dengan pola sarkas dan satir, namun tulisan-tulisan dalam buku ini tidak dimaksudkan untuk menyerang pihak tertentu, tapi hanya refleksi dari tindakan para oknum belaka.

Dengan terbitnya buku ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada guru menulis saya Bapak Jafar Syamsuddin yang telah memberi motivasi kepada murid-muridnya untuk menulis. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada suluruh teman-teman saya, mulai dari MIN Cot Bada, MTsN Matangglumpangdua, MAN Peusangan, IAIN Ar-Raniry, IAI Almuslim, Dayah Darussa'dah Cot Bada dan juga rekan-rekan

kuliah di pascasarjana UIN Ar-Raniry, khususnya Konsentrasi Pemikiran Islam.

Kepada ayahanda Drs. Tgk. Ismail Sarong semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Sebaris doa kepada almarhumah ibunda saya, Mudiah Affan, semoga dilapangkan kuburnya, diterima amalnya dan dilimpahkan rahmat olehNya. Kepada ibu tiri saya, Yusmala, terima kasih atas segala kebaikannya. Terima kasih juga kepada adik-adik saya semoga selalu dalam lindungan Allah.

Selanjutnya kepada istri tercinta, Linda Zahrianur dan anak-anak saya: Sameer al-Qarni, Syahira Fathul Kirami dan Syiza Ghaziya Rihani. Selama ini mereka selalu menasehati saya agar tidak “kurang ajar”.

Terakhir, buku ini bukan kitab suci sehingga ia sama sekali tidak sakral. Dengan demikian, segala bentuk saran dan kritik akan diterima dengan sepenuh hati, asalkan disampaikan dengan cara-cara wajar dan tidak “kurang ajar.”

Kepada semua pembaca, selamat bersantai!

Bireuen, 21 Februari 2019

Khairil Miswar

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	v
Daftar Isi	ix
Bagian Kesatu	
Demokrasi & Politik	1
Bagian Kedua	
Politisi.....	17
Bagian Ketiga	
Caleg.....	33
Bagian Keempat	
Tim Sukses	73
Bagian Kelima	
Money Politik.....	85
Bagian Keenam	
Pilpres 2019.....	95



Bagian Kesatu Demokrasi & Politik



Demokrasi Kurang Ajar

Pasca Soeharto lengser, napas demokrasi semakin terasa di Indonesia. Kebebasan berpendapat pun telah menemukan wujudnya. Sebelumnya demokrasi dan kebebasan hanya menjadi cerita yang terkurung dalam kalimat-kalimat mati. Demokrasi dan kebebasan hanya ada dalam kurikulum dan buku pelajaran.

Sikap politik Soeharto yang “mengalah” pada gejolak massa telah membuka jalan bagi lahirnya Indonesia baru yang mengusung panji reformasi. “Keikhlasan” Soeharto menjadi alarm berakhirnya otoritarianisme penguasa yang telah terpacak selama tiga dekade dari Sabang sampai Marauke.

Saat ini sudah dua puluh tahun Soeharto lengser. Sudah dua puluh tahun pula kita menikmati demokrasi dan kebebasan. Sudah dua puluh tahun kita bebas berteriak dan bersuara lantang tanpa rasa takut.

Demokrasi dan kebebasan yang di masa Soeharto tak berdenyut telah pun berdetak kencang berguncang dan berkobar-kobar.

Demokrasi dan kebebasan yang dulunya mati telah tumbuh berkembang menjalar-jalar mengawal reformasi kita yang semakin tua. Demokrasi kita telah mencapai puncak kejayaannya dalam dua dasawarsa. Demokrasi kita terus bergerak.

Demokrasi dan kebebasan yang dulunya kita impikan telah menembus titik klimaks. Sebentar lagi ia akan terjun bebas menuju demokrasi baru--demokrasi yang kurang ajar dan membabi-butu.

Saat ini kita menyaksikan sendiri bagaimana liarnya demokrasi dan kebebasan yang dulunya kita sanjung dan puja. Dengan demokrasi kita saling memaki, saling menuding dan saling bermusuhan. Dengan kebebasan kita saling menghantam dan memaksakan kehendak. Dengan demokrasi kita memprovokasi dan mengintimidasi. Dengan kebebasan kita saling melukai dan bersangar muka.

Kita semakin kurang ajar!

Dulu kita bermimpi demokrasi akan mempersatukan anak bangsa. Dulu kita berimajinasi bahwa kebebasan akan menghadirkan kebahagiaan. Ternyata, demokrasi telah memisahkan kita dan kebebasan telah menjadi neraka.

Kurang ajar!

Demi Rakyat

Sebatang rokok tampak tertancap di bibirnya yang hitam. Tapi tak hitam-hitam kali, agak kemerahan. Tak jelas apakah rokok itu dibeli secara cash atau kredit. Mulutnya tak pernah sepi dengan benda itu, walaupun pemerintah sudah berpura-pura melarang agar tembakau itu tak diisap lagi.

Sebatang padam sebatang pula menyala. Tak habis-habis. Sambung menyambung. Tarikan asap dari lentingan kecil itu telah menambah kegagahannya di hadapan orang-orang. Sambil sesekali menyembur asap ke udara, kadang pula ke muka orang-orang, dia berceramah tentang hajatnya yang belum kesampaian.

“Pada pemilu kali ini aku harus terpilih. Pokoknya harus. Strategi harus mantap. Kalian harus masuk ke seluruh lorong sampai pematang sawah. Dekati para janda. Cari anak yatim. Santuni fakir miskin! Pastikan kalender dan imsakiah masuk Masjid. Atap-atap bocor perbaiki! Bergerilya!”

Entah berapa kali kata-kata ini diulang-ulang hampir saban tahun. Kepada orang-orang yang sama. Kepada pendengar setia yang telinganya tak pernah berkembang. Telinga-telinga sumbat penuh tinja.

“Nanti kalau aku terpilih, nasib kalian akan berubah. Bekerjalah dengan giat. Perjuangan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk kalian. Ini adalah perjuangan kalian. Bergerilya!”

Dia terus bicara tanpa henti dalam gumpalan asap yang belum reda. Orang-orang di hadapannya terus mengangguk hampir menyentuh lutut sembari semua mulut melepas asap.

Tiba-tiba seorang lelaki tua datang mendekat. Dia terus mendekat dan duduk bersama pendengar-pendengar budiman yang dari tadi tak berkulit. Melihat lelaki tua itu, beberapa pendengar telinga tuli pun bangkit. Satu persatu pamit. Hanya tinggal mereka berdua saling menatap. Tidak ada lagi suara dari orator yang tadinya garang.

“Ini sudah kali keempat kamu menjadi calon. Sudah semestinya kamu berhenti. Entah berapa luas tanah warisan telah kujual membayar utangmu.” Lelaki tua mulai angkat suara.

“Maaf ayah. Aku harus terus berusaha. Anakmu ingin mengabdikan untuk rakyat.” Suara itu terdengar halus, tak lagi berkobar.

Lelaki tua yang tadinya duduk tampak bangkit sambil mencoba meraih tongkatnya yang terjatuh. Matanya terbelalak.

“Kah klo keuh pu. Kupeugah bahasa Indonesia hana meupom sampe payah kupeu Aceh. Abeh tanoh blang gara-gara kah ek caleg. Na kateupu? (Kamu ini tuli. Kuingatkan dengan bahasa Indonesia kamu tidak paham, sampai harus kupakai bahasa Aceh. Habis semua sawahku karena kamu nyaleg. Kau tahu itu?)

Mendengar suara ayahnya, rokok pemuda itu pun jatuh diterbang angin. Hilang dan hilang.

Politik dan Ketelanjangan

Sesuatu yang tabu di luar sana menjadi lumrah saja di pentas politik. Sesuatu yang aneh di ruang lain menjadi wajar sangat di arena politik. Singkatnya, pentas politik praktis telah memberi ruang bagi lahirnya kemungkinan-kemungkinan yang awalnya dianggap tidak mungkin. Kemungkinan-kemungkinan ini terus membiak beranak dan menetas mengiringi perjalanan politik di alam demokrasi yang batas-batasnya nyaris tak terlacak.

Politik di pentas demokrasi layaknya air yang akan mengikut bentuk wadah. Ia terus menyesuaikan diri sesuai selera zaman yang terus berubah. Demokrasi tidak hanya mencairkan sistem politik, tapi juga mencairkan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Prinsip sekeras batu pun akan menemui ajalnya dalam pusaran demokrasi yang semakin gila.

Ketika ruang politik praktis telah mencair, kita pun akan berhadapan dengan ketelanjangan-ketelanjangan yang semakin liar. Ketelanjangan ini akan membuka semuanya seterang-terangnya sehingga kebusukan yang dulunya terpendam pun memencar keluar. Tak ada yang bisa menghalangi ketelanjangan di pentas politik, sebab ia telah membuka diri untuk ditonton oleh berjuta lirikan mata.

Dalam ruang politik praktis yang berselimut demokrasi, ketelanjangan menjadi pilihan bagi siapa saja yang terjebak di dalamnya. Tidak hanya bertelanjang diri, tapi insan-insan

politik juga akan berupaya menelanjangi siapa saja yang diyakini sebagai layak ditelanjangi.

Seorang kiyai boleh saja menjadi “raja” yang suci di hadapan santri-santrinya, tapi di hadapan politik praktis, “kesucian” itu bisa luntur seketika melalui aksi penelanjangan yang tidak bisa dibendung. Kebaikan-kebaikannya yang telah menyebar akan tenggelam dan kesalahan-kesalahannya yang terdalam dan tersembunyi akan menyeruak melalui penelanjangan.

Seorang yang dikenal bersih dan jujur di luar sana dalam seketika bisa kehilangan marwahnya pada saat ia menceburkan diri dalam politik praktis. Kejahatan-kejahatannya yang dulunya terkubur seketika akan terkuak melalui penelanjangan.

Dalam kondisi ini hanya dua pilihan tersisa; membiarkan diri ditelanjangi atau membalas dengan ikut menelanjangi. Akhirnya semua telanjang.

Politik dan Keterlanjuran

Seperti diketahui bahwa politik praktis itu sulit ditebak. Politik praktis penuh dengan teka-teki, trik dan “intrik.” Tidak seperti teka-teki silang yang memiliki rumus tertentu, politik praktis justru tanpa rumus. Ia selalu berubah tanpa harus mengikut logika tertentu. Dalam perencanaannya, politik praktis boleh saja mengampanyekan prinsip tertentu, tetapi dalam pelaksanaannya ia akan mengalir begitu saja tanpa harus merujuk pada prinsip-prinsip yang telah dipacak di awal.

Politik praktis juga penuh dengan keterlanjuran. Sebagian keterlanjuran ini akan terus dipelihara dan dipertahankan, sementara sebagian keterlanjuran lainnya akan diralat begitu saja. Keputusan untuk mempertahankan atau pun meralat keterlanjuran ini sangat tergantung pada dampak yang akan muncul kemudian. Jika keterlanjuran tersebut berdampak positif bagi kepentingan politik praktis, maka ia akan dipertahankan dengan segala argumen apologis. Sebaliknya, jika keterlanjuran ini akan membawa dampak negatif, maka ia akan diralat dengan segala macam cara. Politik praktis itu elastis, seperti karet yang bisa ditarik ke sana ke mari. Bebas!

Sekadar contoh, kubu politik yang sudah terlanjur memainkan isu agama di awal perjalanan politiknya akan berada di “simpang jalan” ketika rival politiknya memainkan isu yang sama. Dalam kondisi ini mereka akan melakukan “ijtihad” ulang, apakah akan melanjutkan isu tersebut sebagai komoditas politik atau memilih meralat dan beralih ke isu lain.

Seperti disinggung di awal, keputusan ini sangat bergantung pada asumsi-asumsi terkait dampak ke depan.

Jika mereka menganggap isu agama masih efektif dan menguntungkan, maka mereka akan merawat keterlanjuran ini. Sebagai contoh, kubu politik yang terlanjur mengampanyekan kepada publik bahwa mereka akan memilih ulama sebagai calon wakil presiden, tapi dalam kenyataannya “batal” memilih ulama dengan pertimbangan tertentu – maka calon wakil presiden yang dalam kenyataannya bukan ulama akan “dipaksa-ulamakan” dengan berbagai cara tanpa peduli publik percaya atau pun tidak. Minimal disantrikan.

Untuk mempertahankan keterlanjuran tersebut bisa dilakukan secara bertahap dan bisa pula sekaligus. Pola bertahap adalah dengan cara meyakinkan publik bahwa calon wakil presiden yang mereka usung adalah seorang santri. Agar publik yakin dengan “klaim” ini, mereka akan mencari argumen yang tepat melalui metode “cocoklogi.” Setelah publik dianggap yakin, status santri tadi akan segera dinaikkan menjadi ulama melalui strategi “pengukuhan.” Muncullah ulama milenial.

Jika nantinya strategi mempertahankan keterlanjuran ini ternyata tidak efektif, maka bukan tidak mungkin mereka akan kembali beralih kepada strategi lain dengan cara meralat keterlanjuran itu. Cara termudah meralat keterlanjuran ini adalah dengan mengampanyekan ulang bahwa ulama tidak pantas masuk ke ruang politik. Untuk menguatkan pendapat ini akan diajukan argumen berlainan yang berbenturan dengan

argumen pertama. Dalam politik praktis, perubahan yang tiba-tiba ini adalah hal lumrah saja.

Cerdasnya demokrasi kita.

Politik Praktis dan Perubahan Perilaku

Politik, khususnya politik praktis secara psikologis dapat mengubah perilaku manusia. Kenyataan ini dapat dengan mudah kita temukan di mana saja dan pada sosok mana saja, tak terkecuali pada diri kita sendiri.

Perubahan perilaku yang terjadi pada sosok-sosok dimaksud tidak hanya berada dalam ruang positif, tetapi juga menysasar ke ruang negatif. Perubahan-perubahan tersebut biasanya muncul pada saat seseorang itu menceburkan diri dalam pentas politik praktis.

Ada sebagian oknum yang pada awalnya bejat, jahat dan bahkan bengal, tapi ketika ia masuk ke dalam ruang politik semisal menjadi caleg, maka dengan segenap daya dan upaya ia pun mencitrakan dirinya sebagai alim dan taat. Uniknya, banyak orang yang percaya dengan manipulasi konyol semacam ini dengan dalih dia sudah bertaubat.

Dengan demikian tidak perlu heran jika ada sosok yang sebelumnya jauh dengan masjid tiba-tiba berdiri di saf paling depan atau bahkan menjadi imam menjelang pemilu. Begitu pula dengan oknum yang dulunya dikenal pelit dan suka berdebat dengan tukang parkir tiba-tiba berubah menjadi dermawan paling budiman.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada pula sebagian orang yang benar-benar berubah dan perubahannya bersifat permanen setelah ia masuk ke ruang politik praktis,

tetapi contoh untuk kasus-kasus semacam ini terbilang cukup langka.

Seperti telah disinggung, dalam sebagian kasus, perubahan perilaku tidak hanya terjadi ke arah positif, tetapi juga negatif. Kita mengenal sosok-sosok yang pada awalnya taat, alim dan bahkan saleh berubah menjadi sosok aneh yang penuh dengan lelucon.

Mungkin kita pernah menyaksikan teman atau sejawat yang pada awalnya pendiam dan berbicara sopan tiba-tiba menjelang pemilu menjadi sosok usil yang suka menyebarkan kebohongan terhadap lawan-lawan politiknya.

Cukup unik, bukan?

Keadilan Demokrasi

Meskipun mengaku sebagai negara demokrasi, tapi terasa ada yang tidak adil di negeri ini. Mungkin ada banyak sekali ketidakadilan yang bisa diurai, namun tulisan ini memilih untuk mempersempit pembahasannya hanya dalam konteks politik praktis.

Karena belakangan ini saya tidak begitu peduli dengan undang-undang dan peraturan terkait politik praktis dalam kaitannya dengan pemilu, sebab saya tidak ambil bagian dalam pertarungan itu, maka saya pun tidak begitu mengerti tentang aturan-aturan tersebut. Dengan demikian tulisan ini pun lahir dalam ketidaktahuan sehingga tidak perlu menuduh saya sebagai tidak mengerti.

Kembali kepada keadilan pentas pemilu, saya (dan kita semua) melihat beberapa kampanye yang dilakukan oleh mereka-mereka yang masih menjabat sebagai eksekutif dan legislatif di lembaga formal pemerintah. Setelah mereka mencalonkan diri kembali, mereka masih tetap pada jabatannya. Dengan kata lain, mereka tidak mundur dari jabatan tersebut. Kondisi inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan dan bahkan tidak demokratis alias tidak “*fair*.”

Disebut tidak demokratis sebab kondisi tersebut menciptakan “jurang” antar-kompetitor yang satu dengan yang lain. Di sinilah terletak ketidakadilan itu, di mana satu kalangan diuntungkan dan kalangan lainnya dirugikan.

Seperti kita lihat, seorang anggota dewan yang kemudian mencalonkan diri kembali sebagai caleg akan sangat mudah melakukan kampanye dalam tugas-tugasnya sebagai anggota dewan. Dalam hal ini publik sulit membedakan yang mana aktivitasnya sebagai anggota dewan dan yang mana pula aktivitasnya sebagai caleg. Semuanya telah bercampur baur. Dengan demikian mereka bisa saja menggunakan setiap fasilitas negara yang melekat pada dirinya untuk melakukan kampanye politik.

Begitu pula dengan calon presiden yang tidak mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri pun berpotensi melakukan tindakan serupa. Acara peresmian jalan tol misalnya – yang pada prinsipnya adalah aktivitas jabatan bisa saja berjalan beriringan dengan kampanye politik, baik terbuka maupun terselubung.

Tidak hanya itu, seorang capres yang masih menjabat presiden bukan tidak mungkin akan menggunakan kekuasaannya untuk mempermulus kemenangannya dalam kontestasi politik. Dan seterusnya, dan seterusnya.

Demokrasi Selfie

Demokrasi kita yang semakin liar telah memungkinkan setiap orang untuk bersikap sesuka hati, khususnya dalam memberikan dukungan politik. Dengan hadirnya media sosial, aksi dukung-mendukung ini pun semakin terbuka dan berlangsung liar di dunia maya.

Seperti kita saksikan, saat ini para politisi, baik caleg maupun cagub, cabup, cawalkot atau bahkan capres sekali pun telah menjadikan media sosial sebagai corong kampanye. Kita menyaksikan para politisi tersebut berfoto dan berselfie ria dengan calon-calon pemilih atau tim sukses dan kemudian disebar via media sosial.

Sebagian politisi juga berebut agar bisa berselfie dengan tokoh-tokoh agama untuk kemudian dicantumkan dalam kalender dan juga disebar di media sosial. Uniknya tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut juga bersedia berfoto dengan hampir semua politisi sehingga foto mereka pun beredar luas, di mana masing-masing politisi mengklaim tokoh dimaksud sebagai pendukungnya.

Ada keyakinan dari sebagian politisi bahwa penyebaran foto-foto tersebut akan berdampak pada elektabilitasnya dalam pemilu. Percaya atau pun tidak ini adalah keyakinan konyol.

Di era media sosial kita akan sangat mudah mendeteksi betapa tidak efektifnya penyebaran foto-foto tersebut, di mana tokoh tertentu juga terdeteksi ikut berselfie dengan semua politisi sehingga dukungannya juga menjadi kabur.

Melalui media sosial kita juga akan mudah mendeteksi dukungan-dukungan palsu dari para oknum tim sukses. Hari ini seorang tim sukses berfoto dengan caleg A dan menyatakan dukungannya melalui media sosial. Besok Caleg B juga menyebarkan foto di media sosial bersama tim suksesnya, di mana si tim sukses tersebut sebelumnya telah menyatakan mendukung caleg A. Demikian seterusnya.

Beginilah realitis demokrasi kita. Keculasan terus merajalela.



Bagian Kedua
Politisi



Keinginan Menjadi Politisi

Ada beragam motif yang mendorong seseorang untuk bergabung dalam partai politik. Ada yang sekadar mencari pengetahuan tentang politik praktis; ada yang cuma ingin mencari pengalaman dan teman; ada yang hendak mempersiapkan diri sebagai tokoh atau minimal calon tokoh; dan ada pula yang didorong oleh keinginan untuk duduk di kursi kekuasaan formal semisal legislatif atau eksekutif.

Beberapa motif tersebut bisa saja bersifat tunggal pada pikiran anggota partai politik dimaksud dan bisa pula mereka “memborong” semua motif tersebut secara bersamaan. Segala kemungkinan tersebut sangat tergantung pada pribadi masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya dorongan-dorongan itu akan menjelma sebagai tujuan-tujuan yang akan dicapai di kemudian hari. Seperti kata “ahli hikmah” bahwa orang yang sukses adalah orang yang setia pada tujuannya. Berpijak pada “nasehat” ini, maka politisi yang sukses adalah politisi yang tetap berpegang pada tujuan awalnya. Jika ia berbelok dari tujuan yang telah dirancangnya sebelum menjadi politisi, maka dengan sendirinya ia akan gagal; dalam pengertian tidak sesuai dengan tujuan.

Seseorang yang bergabung dengan partai politik untuk belajar politik praktis baru bisa disebut sukses jika ia tetap fokus pada pengetahuan seperti dicita-citakannya. Namun jika dalam perjalanannya kemudian ia turut serta dalam

“perebutan” kekuasaan, maka ia adalah politisi yang gagal sebab telah melenceng dari tujuan awal.

Demikian pula dengan politisi yang didorong oleh keinginan mencari teman dan pengalaman akan dianggap sukses jika dia berhasil menemukan pengalaman menarik di partai politik yang dimasukinya. Kesuksesannya juga akan semakin sempurna pada saat ia memperoleh banyak teman di partainya atau di partai lain yang menjadi rivalnya. Sebaliknya, jika dia menggunakan pengalaman dan teman tersebut untuk mencalonkan diri sebagai caleg atau kepala daerah, maka dia pun telah gagal karena telah melampaui tujuan awal.

Model politisi lainnya adalah mereka yang ingin menciptakan dirinya menjadi tokoh publik. Untuk menjadi tokoh publik tentunya tidak harus mencalonkan diri sebagai caleg atau kepala daerah. Namun sebagai politisi mereka tetap melakukan aktivitas politik semisal juru kampanye (jurkam) atau bahkan menjadi pimpinan partai politik tanpa harus menduduki kursi legislatif atau eksekutif di pemerintahan. Bagi tipe politisi ini keberadaanya yang dikenal publik sudah cukup membanggakan tanpa perlu menjadi anggota dewan, bupati atau presiden.

Motif politisi selanjutnya adalah ingin menduduki kursi kekuasaan. Bagi tipe ini, keterlibatannya dalam partai politik hanyalah medium untuk menjemput kekuasaan formal di pemerintahan. Sejak awal bergabung dalam partai politik, sosok ini akan berusaha mencalonkan diri dalam pemilu, minimal sebagai caleg. Kesuksesan tipe ini dapat diukur

apabila ia berhasil menjadi legislatif atau eksekutif di pemerintahan. Biasanya tipikal serupa ini tidak begitu peduli pada pengetahuan politik, pengalaman atau pun teman. Yang terpenting baginya adalah duduk di kursi kekuasaan formal.

Seperti disebut di awal, ada juga sebagian kalangan yang didorong oleh banyak motif dalam waktu bersamaan. Tujuannya bergabung dengan partai politik adalah untuk belajar, ingin menjadi tokoh, mencari pengetahuan, menemukan pengalaman, teman dan sekaligus ingin berkuasa.

Namun demikian dalam kenyataannya hampir sebagian besar politisi mengubah tujuannya, baik terpaksa atau sukarela; atau justru diubah oleh kondisi setelah ia bergabung dalam partai politik. Setiap perubahan tentu wajar-wajar saja, tapi jika merujuk pada motif dan tujuan awal, politisi yang berubah ini adalah sosok-sosok yang “gagal.” Tinggal saja bagaimana kita dan mereka mendefinisikan kegagalan itu.

Konsistensi Politisi

Salah satu makhluk yang terus berubah dan tak pernah konsisten adalah politisi. Kita boleh saja menyebutnya sebagai oknum, tapi mereka adalah oknum yang bertumpuk-tumpuk atau dengan kata lain setumpuk oknum. Mereka bertumpuk dan bertebaran di seantero negeri. Politisi bagaikan air yang selalu mengikut bentuk wadah, terus berubah. Jika pun hendak disebut konsisten, maka konsistensi mereka hanya terletak pada perubahan yang terus menerus tiada henti.

Tentu tidak sulit untuk menemukan rupa politisi semisal ini. Mereka hadir di setiap masa dan di setiap tempat. Dalam setiap kontestasi pemilu wajah mereka terus saja membayangi kehidupan demokrasi kita.

Politisi selalu saja berdiri di atas kepentingan dirinya dan kelompoknya. Kepentingan-kepentingan ini terus saja abadi dan melekat pada sosok politisi. Adapun janji, perkawanan, kesetiaan dan kepedulian hanyalah omong kosong.

Lakon-lakon politisi ini sudah sangat sering kita saksikan sehingga menimbulkan rasa muak yang tak tertahan. Hari ini mereka berkata begini, besok berkata begitu. Hari ini mereka memuji seseorang layaknya malaikat, besok mereka mengutuknya sebagai setan.

Meskipun terlihat aneh, namun realitasnya memang demikian. Dalam kontestasi pilpres misalnya, si A yang dulunya mendukung kandidat B dengan membabi-butakan memuji si B seolah tanpa cela. Uniknya, ketika pada pilpres

selanjutnya si A berpihak kepada kandidat C, dengan segala daya dan upaya ia balik mencela kandidat B. Si A tidak sadar bahwa ia sedang memaki dirinya sendiri.

Politisi dan Kebaikan Semu

Di musim-musim pemilu jumlah orang-orang baik biasanya akan bertambah secara signifikan. Hal ini dapat kita saksikan sendiri di lingkungan kita masing-masing. Sayangnya fenomena ini luput dari sensus.

Tanpa perlu melakukan riset khusus, hampir dapat dipastikan bahwa kemunculan orang-orang baik ini memiliki kaitan erat dengan suksesi pemilu. Dengan kata lain, penambahan orang-orang baik ini akan terjadi lima tahun sekali. Mereka muncul pada saat menjelang pemilu dan akan hilang tiba-tiba setelah pemungutan suara selesai.

Sebagai masyarakat yang hidup di alam demokrasi, kita tidak perlu pura-pura terkejut melihat fenomena ini, sebab ia hanyalah fenomena biasa yang akan terus berulang di musim pemilu. Di musim pemilu banyak digelar kenduri-kenduri besar dengan dalih kepedulian kepada fakir miskin. Para calon kepala daerah atau calon legislatif biasanya akan mengalokasikan sejumlah dana kampanye untuk membantu fakir miskin dan anak yatim di daerah masing-masing. Fakir miskin dan anak yatim ini nantinya akan diminta berdoa untuk kemenangan para politisi.

Pembangunan rumah ibadah yang dulunya terkendala, memasuki masa kampanye biasanya akan banjir bantuan. Para oknum politisi berlomba-lomba memberikan sumbangan dengan harapan nama mereka diumumkan “besar-besar” sebagai donatur melalui corong-corong masjid.

Uniknya lagi ada sebagian oknum politisi yang menyediakan ambulan gratis bagi pasien tidak mampu. Ambulance yang sudah ditemplei stiker politisi ini hilir-mudik mencari pasien untuk diangkut ke rumah sakit tanpa dikenakan biaya. Jika sebelum pemilu sulit menemukan ambulance gratis, maka di musim pemilu justru sangat sulit menemukan orang sakit karena ambulance telah membludak.

Dalam rentang waktu singkat (saat pemilu) kemunculan orang-orang baik semisal di atas memang sangat membantu masyarakat, di mana mereka berlomba-lomba memberi pelayanan kepada masyarakat. Tapi sayangnya kebaikan yang ditunjukkan oleh sebagian oknum politisi itu hanyalah kebaikan semu yang akan segera berakhir ketika pemilu usai.

Orang-orang yang berpura-pura baik itu telah kembali ke habitat aslinya.

Politisi Menceret!

Rasanya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengenal menceret. Dengan demikian, penjelasan tentang menceret, baik secara etimologi maupun terminologi menjadi tidak penting lagi diutarakan. Lagi pula, kajian tentang menceret ini sudah menjamur, khususnya oleh peneliti-peneliti kesehatan. Mereka mungkin telah melakukan riset tentang menceret dari berbagai perspektifnya sampai mereka sendiri menjadi menceret karenanya.

Setidaknya sekali dalam seumur hidup pasti kita pernah mengalami menceret. Jika pun ada manusia yang tidak pernah mengalami menceret, maka ia patut bersedih, sebab ia telah gagal mengalami satu fase penting dalam hidupnya. Dengan demikian, ia pun gagal menjadi manusia “sempurna” karena ketiadaan menceret.

Dalam penilaian banyak orang di dunia ini, menceret adalah satu petaka. Menceret adalah kepedihan. Menceret adalah penyakit dan seterusnya. Jujur, saya merasa kasihan melihat mereka yang berkesimpulan demikian. Mereka hanya melihat menceret dari sudut pandang parsial sehingga melahirkan interpretasi yang negatif dan bahkan destruktif.

Padahal, seperti kata Jean Marais kepada Minke dalam *Bumi Manusia* yang lahir dari imajinasi Pramoedya Ananta Toer, “kita harus adil sejak dalam pikiran.” Mungkin akan butuh penjelasan panjang lebar untuk melahirkan interpretasi yang tepat bagi kalimat bernuansa autokritik ini.

Tersebab itu, saya hanya ingin meminjam pernyataan itu untuk dikaitkan dengan kata menceret.

Merujuk pada kutipan itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita telah bersikap tidak adil kepada menceret sejak dalam pikiran. Kita telah menegaskan kebaikan-kebaikan menceret dengan hanya memosisikannya sebagai petaka belaka. Padahal dalam realitasnya, menceret juga telah berjasa menghadirkan kebahagiaan, kenikmatan dan kegembiraan.

Ketika sekolah dulu, kita bisa dengan mudahnya bolos belajar dengan alasan menceret. “Kenapa kamu tidak sekolah kemarin?” Dengan tenang kita menjawab: “Menceret, Pak!” Akhirnya kita pun terbebas dari hukuman berdiri satu kaki atau tugas membersihkan WC.

Ketika bulan Ramadhan, kita dengan santainya bisa absen *tarawih* dengan alasan menceret. “Cepat ke masjid!” Dengan sedikit mengerang kita mengajukan jawaban: “Menceret, Bu! Demikian pula ketika guru Matematika meminta kita ke depan, kita langsung berlari sambil berseru: “Permisi, Pak. Menceret!” Demikian seterusnya.

Dalam kondisi tersebut, menceret telah membebaskan kita dari rutinitas dan kewajiban. Hebatnya lagi, menceret juga telah mampu menyelamatkan kita dari berbagai tragedi semisal menyelesaikan soal Matematika di bawah ancaman mistar kayu yang tiba-tiba saja bisa mendarat di punggung ketika soal di papan tulis tak terjawab.

Menceret adalah alasan paling efektif untuk menghindari sesuatu dan bahkan ia telah menjadi salah satu strategi praktis

yang paling ampuh untuk diajukan kepada siapa pun. Menceret selalu saja diterima sebagai alasan tanpa reserve, sebab mereka sangat memahami mekanisme menceret dan konsekuensi yang harus ditanggung jika menghalangi orang menceret.

Seperti kita rasakan sendiri bahwa menceret adalah aktivitas mendadak yang tidak bisa direncanakan dan sulit pula dikendalikan. Menceret membutuhkan penyelesaian segera dan bersifat *emergency* yang tidak bisa ditunda-tunda. Konsekuensi paling ringan dan memalukan dari menunda menceret adalah munculnya warna kuning di celana. Jika sekadar warna tidak menjadi soal, tapi ia juga turut mengembuskan aroma yang tidak wajar.

Ulasan di atas hanya pengantar belaka guna memahami menceret dari segala aspeknya. Pemahaman tersebut penting agar kita tidak terus menerus ditipu oleh interpretasi maenstream yang cenderung menguatkan “status quo” sehingga melahirkan indotrinasi yang berakibat pada termarjinalnya menceret dalam kehidupan.

Menceretisasi di Pentas Politik

Di bagian ini, kita akan sedikit berbelok dan memutar haluan ke panggung politik. Kita tidak akan lagi membahas fenomena menceret sebagai aktivitas badani, tapi fokus kita akan beralih pada sifat-sifat menceret – yang entah sadar atau tidak telah masuk dan menyebar di pentas politik praktis dengan mewabahnya menceretisasi di kalangan oknum politisi.

Menceretisasi adalah sebuah proses kemenceretan mental yang mengidab sebagian oknum politisi kita di tanah

air. Seperti halnya menceret badani, menceret rohani juga mengadopsi kaidah-kaidah dalam kejadian menceret disebut pertama. Menceret rohani yang notabene adalah penyakit mental menemukan wujudnya dalam sikap sebagian oknum politisi yang muncul “tiba-tiba” dan “tak terkendali.”

Politisi-politisi menceret ini telah menjadikan panggung politik sebagai medium untuk melakukan aktivitas menceretisasi. Dalam kondisi ini, publik diposisikan hanya sebagai penonton yang mau tidak mau harus menerima semburan menceret yang mereka semprotkan dalam aktivitas politik praktis.

Diakui atau pun tidak, di pentas politik praktis tidak ada pedagang, tidak ada profesor, tidak ada ulama dan tidak ada negarawan; yang ada hanyalah politisi yang mau tidak mau harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh persaingan dan nafsu kemenangan. Segala bentuk kedermawanan, kecerdasan dan bahkan kesalehan yang dipamerkan dalam pentas politik praktis hanyalah fatamorgana belaka sebagai penipu mata.

Siapa pun berpeluang menceret ketika berhadapan dengan aktivitas politik praktis. Penyakit menceret rohani ini tiba-tiba saja akan merasuk dalam pikiran mereka sehingga mereka pun tak kuasa mengendalikan kemenceretan-kemenceretan yang didorong oleh spirit ingin mengalahkan dan mimpi untuk meraih kemenangan.

Seorang oknum politisi yang dulunya dikenal *'alim* dan bahkan dihormati oleh hampir seluruh rakyat akan kehilangan

marwahnya ketika ia terlibat dalam menceretisasi. Tidak sedikit tokoh-tokoh yang dulunya disegani di luar arena politik justru tercemar ketika ia memilih mendukung politisi menceret, atau mungkin ia sendiri memilih menjadi politisi menceret.

Dulu, ketika dia dicela, dia diam dan ketika dihina, dia sabar. Tapi konyolnya ketika ia masuk ke dalam pentas politik praktis, ia pun menjadi politisi menceret yang saban hari menuding, mengejek dan bahkan merendahkan lawan-lawan politiknya secara tiba-tiba. Pentas politik praktis telah mengubahnya menjadi politisi menceret yang sama sekali tidak mampu mengendalikan hati, pikiran dan ucapannya, seperti orang menceret yang tidak mampu menahan berak.

Politisi Gagal

Sebagai sebuah kontestasi, pemilu adalah “perjudian nasib” yang melibatkan para politisi dalam pentas demokrasi. Kemenangan dan kekalahan adalah dua hal yang selalu beriringan, tepatnya bergantian. Politisi yang berhasil memenangkan pertarungan akan bersua dengan kegembiraan. Sebaliknya, politisi yang kalah akan larut dalam kedukaan.

Politisi yang gagal terpilih dalam pemilu tentu akan sangat terpukul dan bahkan “menderita.” Tidak hanya soal kehormatan yang terenggut, tapi juga kepunahan material yang tak terbilang. Kekalahan adalah pukulan yang sangat menyakitkan dan sulit terobati, kecuali dengan kemenangan di lain waktu atau dengan senyuman “suster” di rumah sakit jiwa.

Ramai politisi gagal yang harus rela menjadi “gelandangan” pasca pemilu. Sebagian mereka merasa terhina di depan para sponsor karena harapan kemenangan telah musnah. Sebagian lainnya harus memulai hidup baru untuk membayar utang yang telah menggunung.

Bagi politisi yang memiliki cukup kekayaan mungkin akan mampu bersabar sembari menyusun strategi dan menggalang kekuatan untuk meraih kemenangan pada pemilu berikutnya. Baginya kekalahan adalah sebuah cobaan dan batu loncatan untuk kesuksesan di masa depan.

Yang paling konyol dan menderita adalah politisi-politisi “dhuafa” yang memaksa diri melenggak-lenggok di pentas politik dalam dunia demokrasi yang semakin “gila.” Baginya

kekalahan bukanlah ujian, tapi bencana yang mematikan dan menumpas segala imajinasi sehingga ia pun terpental dalam kehampaan.

Bagi politisi “dhuafa” kekalahan adalah kiamat, sebab segala kekuatan telah terkuras tak berbekas. Bagi mereka tidak ada lagi kebangkitan, sebab kesempatan telah habis. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian harus mendapat perawatan kejiwaan karena guncangan mental yang tak tertahan.

Mereka akan melewati hari-hari sunyi dalam kesendirian. Sadisnya demokrasi!



Bagian Ketiga
Caleg



Tipologi Caleg

Jika “dipaksa-sederhanakan” setidaknya ada tiga motif yang mendorong seseorang mencalonkan diri sebagai caleg. *Pertama*, didorong oleh faktor ekonomi dan perbaikan hidup di masa depan. Bagi caleg tipe ini, pencalonan dirinya sebagai caleg hanya bertujuan untuk kebaikan dirinya sendiri tanpa peduli kepada tugas-tugas legislatif yang nanti diembannya ketika terpilih. Yang terpenting baginya adalah terpilih dan bisa duduk di parlemen untuk kemudian melakukan berbagai usaha legal dan ilegal guna mencari modal dan memperbaiki kehidupan perkonomian dirinya, keluarga dan kroni-kroninya.

Bagi oknum caleg tipe ini, kepentingan masyarakat sama sekali tidak menjadi urusannya. Jika terpilih dia akan memosisikan diri sebagai tokoh di hadapan masyarakat dengan segala kemewahan yang diperolehnya. Sementara di dalam gedung parlemen dia tidak segan-segan bertindak sebagai “begal,” “penyamun,” dan “pencoleng” uang rakyat melalui segala tipu muslihat.

Dengan modal yang telah didapatkannya selama menghuni gedung rakyat, biasanya oknum caleg serupa ini akan kembali terpilih melalui praktik “*money politik*.” Jika pun ia tidak lagi terpilih, ia akan tetap bisa hidup dengan penuh kemewahan sebab pundi-pundi kekayaan hasil “rampasan perang” di gedung rakyat telah sempurna ia garong selagi pantatnya menyentuh kursi parlemen.

Bagi oknum caleg yang “sebangsa” dengannya ia akan “dipuja” sebagai sosok yang pintar dan cerdas. Tidak sedikit calon-calon “begal” lainnya akan berguru kepada oknum caleg tipe ini. Namun di mata masyarakat ia hanya menjadi “sampah” yang “menjijikkan.”

Di Indonesia yang “adil-makmur” seperti saat ini tentunya wajar-wajar saja muncul oknum caleg yang menjadikan pemilu (pileg) sebagai medium “memperbaiki-diri,” khususnya dalam bidang ekonomi. Kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan patut serta “manusiawi” ditambah lagi dengan sulitnya lulus tes pegawai negeri di Republik ini telah mendorong oknum tertentu untuk mencalonkan diri sebagai caleg dengan harapan masa depannya akan cerah, cemerlang dan bahkan gilang-gemilang.

Kedua, didorong oleh keinginan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya (konstituen) melalui usaha-usaha legal di parlemen. Tidak dapat dipungkiri memang ada beberapa sosok – meskipun “satu dalam berjuta – yang gelisah dan resah terhadap kondisi masyarakatnya yang terpuruk. Kegelisahan dan keresahan ini kemudian mendorong mereka untuk berjuang dan berupaya sekuat tenaga agar dirinya terpilih sebagai anggota legislatif guna memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen.

Oknum caleg tipe ini akan merasakan “kepedihan” mendalam jika dirinya tidak terpilih sebagai anggota legislatif sebab kegagalan itu akan memunahkan harapannya. Sebagian dari mereka akan kembali melakukan usaha-usaha lima tahun

ke depan sampai “kemenangan” diperolehnya. Sebaliknya, jika terpilih dia akan berusaha sesuai kemampuannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah diserapnya jauh-jauh hari sebelum ia mencalonkan diri.

Di gedung parlemen, anggota legislatif serupa ini biasanya akan “terkucil” dan “terpinggir” dari para oknum anggota dewan bermental “begal.” Dia akan tetap bersuara lantang di gedung perwakilan rakyat meskipun suaranya hilang tenggelam dalam riuh penolakan. Segala bentuk ejekan dan hinaan semisal “sok idealis,” “sok suci,” dan “sok bersih” akan ia kesampingkan dan dipendamnya dalam hati sebagai sebuah tikaman yang harus dinikmati di tengah “kegilaan” para “begal” yang merajalela.

Bagi sosok yang awalnya (sebelum terpilih) hidup miskin, setelah masa jabatannya berakhir, jika tidak lagi terpilih, sosok serupa ini biasanya akan tetap hidup dalam “kemiskinan” atau mungkin “kefakiran,” karena keogahannya “mencuri” di gedung rakyat. Sementara bagi yang sedari awal sudah “kaya” maka kekayaannya tidak akan bertambah, atau mungkin semakin berkurang sebab keengganannya “menyamun.” Namun demikian segala bentuk perjuangannya akan selalu dikenang oleh masyarakat yang aspirasi mereka telah ia perjuangkan di gedung parlemen. Bagi masyarakat ia akan menjadi “legenda” di kemudian hari. Sebaliknya di mata oknum “pencoleng” uang negara ia akan dikenang sebagai tokoh terburuk yang mengganggu kenyamanan para “penyamun.”

Ketiga, perpaduan dua dorongan; untuk perbaikan ekonomi pribadi dan dalam waktu bersamaan juga ingin memperjuangkan aspirasi para pemilihnya. Caleg serupa ini berada satu tingkat di bawah tipe caleg pertama yang hanya didorong oleh faktor ekonomi belaka. Oknum caleg semisal ini akan mengampanyekan kepada masyarakat bahwa ia akan memperjuangkan nasib mereka dan menyembunyikan misi pribadinya agar tidak terendus oleh publik.

Jika terpilih, caleg tipe ketiga ini akan melakukan misinya secara beriringan. Aspirasi rakyat akan diperjuangkan habis-habisan sekuat tenaga dengan suara yang tidak kurang lantang dari caleg tipe kedua. Namun dalam waktu bersamaan dia juga akan melakukan upaya-upaya legal dan ilegal untuk kepentingan pribadinya. Seperti caleg tipe pertama, oknum caleg tipe ketiga ini juga akan memainkan perannya sebagai “penyamun” secara sembunyi-sembunyi.

Di masa purnatugas, jika ia tidak lagi terpilih, ia bisa hidup mapan dari hasil “mencoleng” selama menjadi anggota dewan. Namun di mata masyarakat ia akan tetap terhormat karena aspirasi mereka pernah ia perjuangkan sembari ia terus “mencuri.”

Keempat, ingin menjadi tokoh. Oknum caleg tipe ini biasanya berasal dari orang-orang yang sudah hidup mapan. Di antara oknum-oknum ini adalah para pengusaha atau mantan pejabat semisal bekas kepala dinas. Dalam konteks ekonomi beberapa oknum ini sudah terbilang kaya, untuk tidak menambahkan “raya” di ujungnya.

Mereka mencalonkan diri sebagai caleg hanya sebatas ingin menjadi tokoh di hadapan publik. Label “anggota” dewan dalam segala levelnya telah cukup untuk menambah status sosialnya dan tidak peduli kepada hal-hal lain. Tugasnya hanya masuk keluar kantor dan sesekali menebar senyum kepada masyarakat. Dia tidak melakukan korupsi karena kehidupannya memang sudah mapan. Dalam posisinya sebagai anggota dewan, dia juga tidak peduli kepada aspirasi rakyat, untuk tidak menyebut “persetan” dengan semua itu.

Beda Caleg dengan Pengemis

KBBI menerjemahkan kata “pengemis” sebagai orang yang meminta-minta. Dalam istilah yang lebih “agamis” pengemis dapat disebut sebagai “pencari sedekah.” Di negeri kita yang “adil-makmur” ini, pengemis masih sangat mudah ditemui. Mereka dapat dijumpai di lampu merah, persimpangan jalan, emperan toko, pasar dan bahkan ramai pula yang “bergerilya” di warung-warung kopi. Atau mungkin kita sendiri juga pengemis?

Dalam dunia modern, pengemis terdiri dari dua jenis. *Pertama*, pengemis yang memang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja karena segala keterbatasan yang dimilikinya seperti saudara kita penyandang cacat (*disabled*). *Kedua*, pengemis yang berasal dari orang malas bekerja dan bertubuh kekar. Pengemis model kedua ini menjadikan aktivitas mengemis sebagai lahan bisnis yang cukup menjanjikan.

Tidak hanya di lampu merah dan emperan toko, “pengemis” dalam bentuk yang lain juga dapat ditemukan dalam pentas politik. Dengan kata lain, aktivitas “mengemis” juga hidup dan berkembang di panggung politik praktis semisal pemilu.

Pengemis lampu merah mengharapkan “uang receh” melalui belas kasihan orang-orang di jalan raya. Sebaliknya, “pengemis” di pentas politik semisal oknum caleg justru tidak membutuhkan uang receh. Mereka mengharap sesuatu yang lebih besar, yaitu suara dari calon-calon pemilih.

Dilihat dari segi aktivitas, terdapat kesamaan antara politisi semisal oknum caleg dengan pengemis. Jika pengemis meminta-minta uang atau sedekah, maka beberapa oknum caleg meminta-minta suara. Persamaan lainnya terdapat pada adanya harapan bagi si pemberi. Si pemberi sedekah berharap pahala dari aktivitasnya membantu pengemis. Demikian pula dengan pemberi suara (pemilih) pun menaruh suatu harapan kepada caleg yang dipilihnya.

Perbedaan antara pengemis dengan politisi semisal caleg hanya terdapat pada “kewajiban.” Si pengemis – setelah menerima sedekah, tidak memiliki kewajiban apa pun kepada si pemberi, dan si pemberi pun tidak mengharap apa pun dari si pengemis (kecuali pahala). Kondisi ini berbeda dengan caleg misalnya; setelah menerima suara, dia memiliki kewajiban kepada si pemberi suara (sesuai janjinya); dan si pemberi suara berhak menuntut si caleg atas kebohongan-kebohongan di musim pemilu.

Lantas, siapa yang lebih mulia? Pengemis lampu merah atau pengemis suara?

Caleg dan Ilusi

Khususnya caleg-caleg muda yang baru mengawali karier dalam pentas politik praktis cenderung hanyut dalam ilusi yang kemudian berujung pada delusi. Semangat yang membara dan bahkan menyala-nyala sering kali membuat mereka larut dalam mimpi-mimpi di siang hari. Mimpi yang sama sekali jauh dari kenyataan alias mimpi dikencingi setan.

Menjelang musim politik, tak sedikit caleg-caleg baru yang terpana, terpesona dan bahkan teperdaya dengan alunan hikayat yang dimainkan oleh para tim sukses. Siang malam pagi petang mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendengar laporan demi laporan tentang kemenangan yang akan diraih di masa depan. Dalam kondisi tertentu sebagian oknum tim sukses telah pula sukses menjadi pelakon sandiwara paling mahir sejagat yang mampu mematahkan nalar caleg melalui “jampi-jampi” yang memikat.

Di musim pemilu, oknum caleg-caleg muda seperti kehilangan akal sehat dan menyerahkan sebagian kesadarannya pada rayuan manja para oknum tim sukses yang pada hakikatnya hanya mencari sesuap nasi dari “belas kasihan” caleg yang menaruh harapan pada bayangan kursi di parlemen dengan seperangkat “kenikmatan” yang melekat.

Sebagian oknum caleg-caleg baru akan terkesima, tercengang-cengang dan termangu-mangu ketika mendengar kata “massa” dan “dukungan” yang keluar dari mulut oknum tim sukses. Kata-kata itu seperti mengandung aura

mistis sehingga memengaruhi psikologi caleg di musim-musim politik. “Itu massa kita” atau “Satu kampung sudah memberikan dukungan” adalah sebagian dari banyak mantra yang efektif meluluhkan hati caleg yang dilanda “asmara” kursi parlemen.

Kita tentu sering melihat beberapa oknum caleg baru yang menghabiskan uang di kedai kopi beratus-ratus ribu bahkan sampai berjuta-juta karena disangkanya pemilik warkop dan seluruh pengunjung adalah pendukung setianya sebab mereka menebar senyum manis nan manja ketika si caleg memasuki warkop. Jiwanya semakin tersentak dan bahkan terharu ketika melihat poster dengan wajahnya terpajang di dinding-dinding warkop. Ia teperdaya sembari berteriak dalam hati, “Selangkah lagi kursi parlemen.”

Asyiknya demokrasi kita.

Caleg Ban Serap

Ada banyak cara menjadi “terkenal” sembari mencari uang kopi. Salah satunya adalah dengan menjadi caleg ban serap. Keberadaan caleg ini dapat kita temui hampir di setiap daerah yang diusung oleh sejumlah partai politik.

Caleg ban serap adalah “caleg palsu” yang “berpura-pura” mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Profesi ini lumayan menarik bagi sebagian orang yang ingin mencari pendapatan tambahan di tengah kondisi ekonomi saat ini yang sulit diceritakan.

Dalam beberapa kasus, caleg ban serap sengaja menghubungi caleg lain atau parpol tertentu untuk menawarkan diri sebagai ban serap yang akan mengumpulkan suara untuk caleg tertentu. Sementara dalam beberapa kasus lain, caleg ban serap justru sengaja diincar oleh caleg atau parpol tertentu dengan tujuan mendongkrak suara.

Sebagian caleg ban serap memang sadar dan tahu bahwa dirinya dijadikan serap, sementara sebagian lainnya tidak sadar kalau dirinya dicalonkan hanya sebagai serap. Bagi yang sadar dirinya serap, mereka memang sengaja mempersiapkan diri untuk mencari pendapatan tambahan dari caleg utama. Secara umum mereka dibiayai oleh caleg utama untuk mengumpulkan suara. Proses pembiayaan ini meliputi segala persyaratan dalam pendaftaran, biaya pertemuan dan biaya cetak atribut kampanye. Dalam hal ini, caleg ban serap hanya

duduk manis tanpa harus berpikir tentang persoalan biaya yang tentunya tidak sedikit.

Sementara itu, caleg yang tidak sadar dirinya dijadikan serap justru akan menjadi korban pasca pemilu. Pada awalnya dia dirayu oleh caleg utama dengan puji-pujian sehingga mencalonkan diri, tapi pasca pemilu segala bentuk kerugian akan ditanggung sendiri. Biasanya caleg serap serupa ini akan diberikan motivasi berlebihan oleh caleg utama atau partai politik agar semangatnya untuk mencalonkan diri menyala.

Dalam beberapa kasus yang sering dijadikan sebagai caleg ban serap adalah tokoh masyarakat yang sudah dikenal publik. Selain itu beberapa caleg dari kalangan perempuan, baik sengaja atau pun tidak juga sering dijadikan sebagai ban serap untuk sekadar mendulang suara. Caleg ban serap adalah sosok yang tidak pernah diharapkan untuk terpilih, tapi hanya sebagai pelengkap dan pengumpul suara.

Dari dua model caleg ban serap yang telah diulas di atas, yang sadar dirinya serap akan memperoleh keuntungan dalam proses dan pasca pemilu, sedangkan yang tidak sadar dirinya dijadikan serap akan menanggung luka sendirian. Cukup demokratis, bukan?

Caleg Cengeng

Pernah suatu kali saya menulis status pendek di *facebook* tentang caleg dan tempat pesta. Saya menyatakan kalau kita lupa nama caleg, kita bisa mencarinya di tempat pesta, sebab di sana banyak papan bunga yang dilengkapi dengan gambar caleg. Terkait fenomena tersebut secara utuh sudah pula saya tulis dengan tajuk “Mencari Caleg di Tempat Pesta.”

Kembali ke status *facebook*. Postingan saya tentang caleg tersebut kemudian mendapat komentar dari beberapa orang dengan nada santai. Sebagian sepakat dan sebagian menolak. Namun di sebalik itu, ada pula komentar dari seseorang yang menanggapi dengan nada keberatan. Katanya, kita tidak boleh (menuduh) begitu, sebab ramai caleg yang memang dari dulu suka bersilatullah dan berkunjung ke tempat pesta. Artinya kunjungan caleg ke tempat pesta tidak bisa secara otomatis ditafsirkan sebagai trik politik. Komentar tersebut langsung saya “tertibkan,” sebab telah keluar dari jalur yang benar.

Saya tidak tahu, apakah komentator itu caleg atau bukan. Tapi, saya menilai komentar semacam itu sebagai wujud dari kecengengan. Sebab itulah harus segera ditertibkan agar tidak menjalar. Adalah pantang bagi seorang caleg untuk bersikap cengeng dan baper, apalagi sampai mentel. Seorang caleg harus kuat menghadapi ujian dan sindiran dari siapa saja. Dengan bahasa yang lebih halus, caleg itu harus mampu bermuka tembok.

Melalui ujian dan sindiran inilah seorang caleg dapat belajar mendengar suara rakyat. Jika sebelum terpilih saja sudah cengeng, bagaimana nantinya jika sudah duduk di parlemen? Sudah semestinya para caleg belajar mendengar dan belajar menghadapi kritik sedari sekarang. Lagi pula, tidak ada yang berani menjamin bahwa pendengaran mereka (para caleg) masih baik ketika terpilih nantinya. Seperti kita lihat, tidak sedikit oknum anggota dewan yang kehilangan pendengaran setelah pantatnya menyentuh kursi parlemen sehingga harus dipanggil sambil teriak-teriak pakai toa. Dan, ketulian dalam pentas demokrasi itu adalah hal biasa. Atau mungkin sebuah strategi?

Caleg Medsos

Ada banyak ragam strategi kampanye yang dilakukan para caleg guna meningkatkan elektabilitasnya, salah satunya melalui media sosial. Mereka berharap melalui strategi tersebut akan sukses terpilih sebagai anggota dewan.

Tidak dipungkiri bahwa media sosial memiliki peran besar melahirkan sosok-sosok “populer” dalam waktu singkat. Ada banyak sekali contoh untuk diurai terkait klaim ini. Seperti kita lihat, sosok-sosok yang sebelumnya “gelap” tak dikenal, tiba-tiba saja populer hanya karena hobi *update* status di *facebook*. Seketika saja ia menjadi tokoh karismatik dengan sejumlah pengikut fanatik.

Bukan tidak mungkin kenyataan itulah yang kemudian mendorong sebagian caleg untuk berkampanye di media sosial. Tentunya bukan hanya caleg, bahkan calon presiden pun turut berselfi ria di media sosial.

Namun demikian, tulisan ini tidak bermaksud berdebat terkait efektivitas kampanye di media sosial, sebab debat semacam itu tidak akan memuaskan siapa pun. Lagi pula sudah ada peneliti yang memiliki kesimpulan sendiri-sendiri terkait efektivitas dimaksud.

Tulisan ini hanya ingin menyinggung beberapa oknum caleg yang terkesan larut di media sosial. Mereka tertipu oleh imajinasinya sendiri ketika berkampanye di medsos. Mereka menghabiskan seluruh energinya di medsos sehari-hari, berbulan-bulan sampai akhirnya pemilu pun tiba tanpa mereka

sadari. Akibat imajinasi dan harapan palsu mereka pun gagal melenggok ke kursi parlemen.

Kesadaran baru akan menyapa, ketika tak selebar pun nama mereka tercoblos di kotak suara. Saat itulah mereka baru mengerti bahwa pemilih itu ada di kampung-kampung dan di sudut kota, bukan di medsos; bukan di *facebook* dan bukan pula di *twitter*, apalagi *instagram*. Kampanye medsos hanya berdampak pada popularitas, dan popularitas belum tentu berdampak pada elektabilitas. Dalam kenyataannya tidak semua yang dikenal itu dipilih. Dengan demikian, menjadikan medsos sebagai satu-satunya corong kampanye adalah tindakan bodoh, untuk tidak menyebut tolol, sebab pemilu tidak berlangsung di *facebook*.

Caleg Pelit dan Caleg Boros

Siapa saja yang mencalonkan dirinya sebagai caleg pasti membutuhkan uang guna memuluskan aktivitas politiknya. Adalah omong kosong jika ada caleg yang menganggap uang tidak penting dalam kontestasi politik. Popularitas hanya modal dasar yang membantu lancarnya aktivitas politik, bukan penentu kemenangan. Tanpa uang semuanya akan buyar.

Belum lagi mendaftar sebagai caleg, uang sudah harus dikeluarkan, minimal untuk biaya pas foto 3x4 atau 4x6. Setelah mendaftar, kebutuhan akan uang pun semakin meningkat. Demikian pula saat memasuki musim pemilu, stok uang juga harus stabil.

Dalam kaitannya dengan uang ini, sosok caleg terbagi kepada dua jenis; caleg pelit dan caleg boros. Pelit dan boros adalah sifat normal manusia yang tentunya juga dimiliki oleh caleg yang notabene berasal dari manusia pula.

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan munculnya sikap pelit dan boros pada caleg tertentu. *Pertama*, faktor bawaan; artinya sebelum menjadi caleg sosok tersebut memang sudah pelit atau boros. *Kedua*, faktor kondisi; artinya sikap pelit dan boros ditentukan oleh stok uang yang dimilikinya. Jika uangnya banyak ia bersikap boros dan jika uangnya sedikit ia berubah menjadi pelit.

Sebagian masyarakat kita menyukai caleg boros dan membenci caleg pelit. Dalam konteks kebutuhan sebagian masyarakat akan uang tentunya penilaian semacam ini menjadi

wajar belaka. Namun terlepas dari semua itu sikap boros dan pelit adalah sama-sama tercela jika mereka meletakkan sikap tersebut bukan pada tempatnya.

Caleg boros adalah mereka yang menghamburkan uang di luar tempatnya sehingga sia-sia. Sementara caleg pelit adalah mereka yang abadi pada kepelitannya dan tidak mau mengeluarkan uang meskipun di tempat bermanfaat.

Adapun sosok caleg ideal adalah mereka yang mampu dan cerdas mengatur keuangan mereka secara efektif. Dia akan mengeluarkan uang jika diyakininya pengeluaran tersebut berdampak pada keterpilihannya dalam pemilu. Selain itu, dia juga mampu menahan pengeluarannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi posisinya sebagai caleg.

Caleg boros pada umumnya tidak akan mampu memenangkan pertarungan dalam pemilu. Demikian pula dengan caleg boros pun belum tentu sukses mendapatkan kursi yang kian mahal dalam demokrasi kita.

Caleg dan Utang

Bagi caleg, setiap tahapan pemilu (pileg) yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara adalah jalan perjuangan yang harus dilalui dengan sabar. Langkah perjuangan seorang caleg telah dimulai sejak ia menceburkan dirinya dalam arena politik praktis. Mendaftarkan diri sebagai kader partai politik adalah langkah paling awal yang ditempuh setiap caleg untuk dapat terlibat dalam kontestasi lima tahunan memperebutkan kursi parlemen.

Untuk dapat mengajukan diri sebagai seorang caleg juga dibutuhkan modal, sekurang-kurangnya untuk membuat pas foto atau minimal membeli peci agar terlihat berwibawa. Modal ini bisa saja berasal dari uang pribadinya, bantuan teman-teman, hasil menipu atau mungkin disponsori oleh sosok tertentu. Terlepas dari mana modal berasal, yang jelas kebutuhan akan modal tidak bisa dinafikan.

Pasca ditetapkan sebagai caleg, modal demi modal masih terus dibutuhkan untuk dapat melalui setiap tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan kampanye adalah paling menentukan bagi kesuksesan seorang caleg. Untuk dapat melakukan kampanye secara efektif seorang caleg membutuhkan modal yang kuat alias uang yang banyak.

Dalam kondisi inilah sebagian oknum caleg yang baru terjun dalam pentas politik terjebak dalam transaksi utang untuk biaya politik. Ramai di antara mereka yang teperdaya oleh harapan kemenangan sehingga kuitansi utang pun

menumpuk tanpa disadari. Bentuk utang pun bervariasi, mulai dari utang normal sampai utang dengan bayaran berlipat dari rentenir.

Oknum caleg serupa ini selalu menanamkan keyakinan dalam hatinya bahwa utang-utang itu nantinya akan diselesaikan pasca dirinya berhasil menuju kursi parlemen. Dia terus menghibur dirinya dengan khayalan-khayalan yang dibuatnya sendiri. Khayalan gaji yang sekian, dana aspirasi dan uang ini itu yang bertumpuk-tumpuk dalam imajinasinya.

Pasca pemilu, jika si oknum caleg ini terpilih, maka beban utama yang menghantam pikirannya adalah utang yang harus segera dibayar. Idealnya caleg yang terpilih diliputi oleh kegembiraan yang mengasyikkan. Kondisi ini berbeda dengan caleg yang telah menumpuk utang. Mereka tidak merasakan kegembiraan dan justru larut dalam ketertarikan tentang kapan utang-utangnya akan lunas.

Jika mata kirinya menatap kursi parlemen yang sebentar lagi akan didudukinya, maka mata kanannya justru diganggu oleh tumpukan kuitansi utang dengan jumlah yang melebihi gajinya selama lima tahun. Hari-harinya di parlemen nantinya akan tersita untuk penyelesaian utang yang terus mendesak.

Bagi caleg serupa ini, kemenangan yang diperolehnya justru tidak memberikan makna apa pun, kecuali peningkatan status sosial karena kini dia dipanggil “Pak Dewan.” Bagaimana pula jika seandainya dia tidak terpilih? Hanya ada dua pilihan; menyamar sebagai orang gila atau melarikan diri.

Caleg Seumur Hidup

Setiap lima tahun sekali, kita selalu saja dihadapkan pada “sandiwara” terbesar bernama pemilu. Sandiwara yang sulit ditebak. Selain memilih pemimpin, kita juga akan menentukan siapa saja yang akan menjadi wakil kita di parlemen.

Pesta demokrasi ini terus saja berulang dari masa ke masa dan tidak akan berhenti sebelum bumi ini digulung. Terkadang kita sendiri juga terlibat di dalam pesta lima tahunan ini dengan peran masing-masing, minimal sebagai tukang coblos.

Seperti telah kita singgung di awal; salah satu pekerjaan kita di pemilu adalah memilih calon-calon legislatif yang akan duduk di kursi DPR di setiap jenjangnya. Calon legislatif itu biasa disingkat dengan caleg. Ada juga sebagian kalangan yang menulis kata tersebut sebagai “calek” – yang jika dipanjangkan akan menjadi “calon lekislatif.” Mungkin saja yang bersangkutan sering mendengar kata-kata itu diucapkan di kedai-kedai kopi tanpa pernah melihat teksnya secara langsung. Lagi pula bagi masyarakat awam seperti kita hal itu tidak terlalu penting.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, siapa pun memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai caleg asalkan dia mampu memenuhi syarat seperti menyandang status WNI dan punya hubungan dengan partai politik serta persyaratan lainnya sesuai amanah undang-undang. Caleg adalah langkah awal untuk dapat menjadi *leg* (legislatif). Tanpa ada proses *ca* (calon) ini, tidak mungkin ia menjadi *leg*. Tapi, dalam

kenyataannya, tidak semua caleg sukses menjadi legislatif. Ada yang terpilih dan ada pula yang terpentat berguguran. Orang yang terpilih akan segera dilantik menjadi legislatif, sementara yang tidak terpilih akan menyangand status sebagai “caleg gagal” tanpa upacara apa pun.

Yang sudah pernah terpilih sebagai legislatif biasanya akan kembali mencalonkan diri untuk lima tahun berikutnya dengan harapan terpilih kembali. Demikian pula dengan mereka yang tidak terpilih di tahun sebelumnya, biasanya juga ikut-ikutan mencalonkan diri kembali dengan impian dapat terpilih kali ini. Dan, seperti biasa; nantinya ada yang terpilih dan ada yang tidak.

Dalam perjalanan pileg lima tahunan; ada sosok yang dari pertama terpilih dan terus-menerus terpilih sepanjang waktu sampai dirinya dipilih oleh malaikat maut. Ada pula yang tidak pernah terpilih sekali pun seumur hidupnya sampai-sampai dia harus memilih profesi lain seperti jualan cendol. Tidak sedikit pula yang sekali begini sekali begitu; sekali terpilih sekali gagal. Berulang dan terus berulang mengikut irama takdir.

Uniknya lagi, ada juga yang memilih menjadi caleg seumur hidup. Dia terus berjuang pantang menyerah. Dia tidak peduli pada kejatuhan, terus saja bangkit dengan penuh semangat. Baginya, kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Dia terus berusaha mengejar kesuksesan yang menurutnya sudah dekat di depan mata. Sedikit lagi. Lagi dan lagi. Sampai akhirnya ia sadar sudah berada di hadapan

sebuah sumur dengan jala di bahu dan pancing di tangan. “Di sini banyak ikan,” katanya sambil tertawa sendiri.

Sadis memang!

Senyum Caleg di Media Sosial

“Musim caleg” telah tiba. Pertanda musim ini dapat dengan mudah kita lacak melalui media sosial. Tanpa dilacak pun, terkadang ia memaksa menyapa.

Wajah dengan senyum dipaksakan pun bergentayangan liar di media sosial. Kita seperti dipaksa menghitung gigi-gigi mereka dengan muka diseri-serikan.

Media sosial menjadi ladang baru bagi mereka untuk menggarap simpati. Segala prestasi dan kebaikan yang pernah dilakukan selama ini pun dihempas ke publik. Sebagai pemantik simpati guna mendapat kursi.

Muka-muka tanpa malu itu terus saja bersaing tanding dengan muka-muka lain yang serupa. Saling rebut, saling ejek dengan terus mengukuh diri sebagai yang terbaik.

Media sosial menjadi medium paling efektif untuk memperlihatkan wajah-wajah suci berhati bandit. Mereka tampil percaya diri untuk sebuah kursi yang seolah warisan moyangnya sendiri.

Hampir tak ada lagi amal yang tersembunyi. Semuanya terbang kian kemari menyinggahi beranda media sosial yang tak pernah sepi. Dan kebaikan mereka pun terus berlari-lari demi kursi.

Mencari Caleg di Tempat Pesta

Sadar tidak sadar, sepakat tidak sepakat, di musim pemilu sosok caleg terus bergerilya mencari dukungan guna meraih kemenangan pada pileg yang digelar lima tahun sekali. Entah oknum entah bukan, yang jelas mereka terus berusaha mencari simpati publik.

Gerilya para caleg tidak hanya berlangsung di pusat-pusat kota, tapi juga di pelosok desa. Kita tentu pernah mendengar syair lagu bahwa gunung tinggi akan kudaki dan samudera luas kuseberangi. Musim pemilu adalah masa bagi para caleg untuk mendaki dan menyeberangi demi menuju kursi DPR.

Dalam gerilya ini, para caleg tidak akan merasa goyah dengan badai yang mengadang. Hujan petir dan angin ribut, bahkan topan sekali pun tak menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita menuju parlemen. Siang malam pagi petang para caleg kita terus berjuang tiada henti, tanpa lelah dan tanpa bosan. Terus berkobar-kobar dengan semangat menyala-nyala.

Salah satu tempat yang menjadi incaran para caleg (mungkin oknum) saat pemilu adalah tempat-tempat pesta alias rumah kenduri. Tidak hanya hadir ke sana, tapi sebagian caleg juga memajang papan bunga di sepanjang jalan menuju tempat pesta.

Di rumah kenduri ini kita bisa menyaksikan pajangan papan bunga yang hampir mirip dengan suasana pameran. Papan bunga dengan berbagai ukuran itu memuat foto manis para caleg dengan berbagai gaya; mulai dari senyum tipis,

senyum lebar, tertawa lepas dan juga melambai tangan. Sebagian genit dan sebagian norak.

Pakaian yang dipakai pun beragam; mulai dari pakaian haji sampai pakaian adat yang biasa terlihat di karnaval. Semarak nian!

Di musim politik pemilu, tempat pesta menjadi salah satu arena kampanye yang lumayan efektif untuk menebar pesona. Di sana tersedia lapak-lapak gratis untuk papan bunga dengan berbagai harga.

Bahkan jika seandainya kita lupa nama-nama caleg yang akan kita pilih nanti, maka tidak perlu gusar dan tak perlu pula menelepon KPU. Kita cukup berkunjung ke tempat-tempat pesta dan segera ingatan kita akan kembali semula. Wajah para caleg bertaburan dan menyemak di sana, menyambut para tamu yang berkunjung.

Uniknya tidak hanya pesta-pesta besar, pesta-pesta kecil pun tak luput dari kunjungan caleg. Bahkan di acara sunat rasul dan acara turun tanah yang hanya dihadiri beberapa orang juga terlihat caleg-caleg yang nyasar. Sesuatu yang mustahil mereka lakukan setelah menyandang gelar anggota dewan.

Ketika Semua Teman Jadi Caleg

Apa jadinya jika kita memiliki teman dua ribu orang dan setengahnya maju sebagai caleg? Sebagian dari partai yang sama, sebagian lagi dari partai yang berbeda.

Apa jadinya jika semua teman itu kemudian meminta dukungan? Masing-masing mereka hanya meminta satu suara dari kita. Hanya satu suara. Kita bawa ke mana suara kita?

Mereka semua adalah teman kita, dan kita adalah teman mereka. Semua berharap agar kita mendukung mereka. Bagaimana jadinya?

Semua teman kita yang “nyaleg” mengaku ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan sejauh ini memang belum pernah ada yang berani jujur bahwa mereka akan menipu rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita disebut pertama, mereka mengajak kita untuk memilih mereka. Bagaimana kita memberi jawaban?

Bagaimana pula jika di kampung kita ada sembilan caleg? Pemilih di kampung cuma seratus orang. Mereka semua sama berjanji akan memajukan kampung kalau terpilih. Siapa yang harus kita pilih?

Jika semua teman caleg mengukur kesetiaan kita dengan cara memilih mereka, kepada siapa kita harus setia? Teman kita dua ribu dan yang nyaleg seribu.

Dan, kenapa semua harus memilih menjadi jadi caleg? Apakah fenomena ini menjadi bukti bahwa begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak di negeri ini?

Tim Sukses Menipu Caleg

Mendekati pileg, sebagai rakyat, atau minimal orang-orang yang “dipaksa” menjadi rakyat, kita tentu harus paham bagaimana demokrasi kita dijalankan. Kita juga harus tahu trik-trik apa saja yang biasa digunakan oleh oknum tim sukses untuk menipu caleg. Dalam demokrasi kita, segala perilaku mungkin saja terjadi, termasuk penipuan terhadap caleg yang dilakukan oleh oknum tim sukses tertentu.

Berikut ini adalah beberapa perilaku alias trik yang mungkin saja digunakan oleh oknum tim sukses untuk menipu caleg.

Pertama, jika ada caleg yang meminta dukungan, biasanya tim sukses akan menyambut dengan ramah. Tim sukses akan mengatakan kepada caleg bahwa rakyat membutuhkan orang-orang seperti dia (caleg). Mereka juga akan menyemangati caleg agar dia memantapkan pikiran dan tekad untuk maju. Mereka memuji caleg setinggi langit, setinggi-tingginya. Khusus caleg-caleg baru, biasanya akan tergoda dengan mantra ini. Setelah itu, mereka biasanya akan meminta sedikit uang kopi untuk membicarakan pencalonannya dengan kawan-kawan. Kalau tipuan pertama ini berhasil, maka segera berlanjut dengan tipuan berikutnya.

Kedua, setelah caleg menaruh kepercayaan dan tergoda dengan rayuan di atas, mereka segera mengusulkan pembentukan tim sukses. Untuk tahap awal, mereka mencatat beberapa nama anggota tim sukses di kertas atau diketik rapi

dan dilengkapi dengan foto copi KTP. Untuk mendapatkan foto copi KTP tentu mudah saja. Setelah daftar nama-nama tim sukses diajukan kepada caleg, kemudian tim sukses akan meminta biaya administrasi.

Ketiga, setelah tim sukses terbentuk, mereka biasanya mengajukan jadwal pertemuan tim sukses dengan caleg. Untuk mempermudah mengumpulkan orang-orang akan diusulkan agar pertemuan dilakukan di kedai kopi. Setelah usulan pertemuan dan tempat diterima, mereka kembali meminta sejumlah dana untuk *mengorganisir* tim sukses dan biaya makan-minum saat acara. Agar keuangan aman terkendali, jumlah anggaran yang diajukan biasanya dikalikan dua, tiga, atau empat; sesuai kebutuhan.

Keempat, untuk menarik perhatian caleg, pada hari pertemuan tim sukses orang-orang dikumpulkan tiga puluh menit sebelum jadwal. Mengumpulkan orang-orang sebenarnya mudah saja dengan cara membuat pengumuman di kampung bahwa ada acara makan-minum di kedai si A pada pukul sekian. Pada saat orang-orang sudah terkumpul, si tim sukses akan memberi sedikit penjelasan kepada mereka, bahwa sebentar lagi akan ada caleg yang datang. Mereka boleh pesan kopi, jus dan makanan apa saja dengan syarat harus mengangguk apa saja yang akan disampaikan caleg. Tim sukses juga akan mengingatkan orang-orang tersebut agar tidak ada yang membantah pernyataan caleg nantinya. Terkadang tim sukses juga mengatur beberapa orang untuk menipu si caleg bahwa di beberapa kampung, rakyat sudah

sepakat memilih dia. Tipuan ini diharapkan dapat memberi motivasi kepada caleg. Tetap semangat!

Kelima, pada saat caleg tiba di lokasi, sebelum acara dimulai, tim sukses berbisik kepada caleg agar nanti setelah acara disediakan sedikit uang transport. Tim sukses kemudian meminta uang itu ditiptkan kepadanya. Persoalan uang transport itu biasanya akan dirahasiakan oleh tim sukses agar tidak diketahui oleh orang-orang yang sudah dikumpulkan tadi. Kepada para undangan biasanya cukup diberi makan minum dan rokok.

Keenam, setelah pertemuan selesai, tim sukses sampaikan kepada caleg bahwa mereka membutuhkan spanduk, baliho, stiker *banner* dan kartu nama. Tim sukses meminta agar caleg mencetak dalam jumlah banyak dengan alasan anggota tim sukses sangat ramai. Dalam sebagian kasus, tim sukses juga merayu caleg agar dia memercayakan percetakan yang pas kepada tim sukses. Dengan cara ini, tim sukses juga mendapat keuntungan di percetakan.

Ketujuh, pada saat alat peraga kampanye tersebut selesai dicetak, tim sukses segera menemui caleg untuk meminta biaya distribusi kartu nama, stiker, *banner* spanduk dan baliho. Untuk spanduk dan baliho, mereka juga tidak lupa meminta biaya tambahan untuk membeli tali dan tiang. Biasanya harga tali dan tiang lebih mahal dari spanduk/baliho. Satu lagi, ongkos pasang harus di atas UMP.

Kedelapan, kalau biaya distribusi sudah dicairkan, tim sukses segera keliling kampung. Untuk menghemat anggaran,

kartu nama dan stiker dibagikan sendiri di kedai-kedai kopi dan tempat keramaian, atau meminta anak-anak yang punya sepeda untuk membagikannya ke rumah-rumah di kampung. Biasanya anak-anak tidak meminta bayaran mahal. Untuk memasang spanduk dan baliho, tim sukses mengajak beberapa pengangguran di kampung dengan sistem kerja borong. Dengan pola ini akan banyak uang yang tersisa.

Kesembilan, dalam tahap selanjutnya, tim sukses segera usulkan kepada caleg untuk melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuda. Untuk meyakinkan si caleg, pada saat bertemu, biasanya tim sukses mengajak satu atau dua orang teman yang mirip tokoh, misalnya yang sering pakai peci. Pada saat usulan sudah diterima, tim sukses tersebut segera meminta dana dari caleg untuk mengatur pertemuan dengan para tokoh; sewa tempat dan konsumsi. Biasanya pertemuan dilaksanakan di aula hotel. Dalam kondisi tertentu tim sukses tidak lupa membuat perjanjian komitmen fee dengan penyedia tempat dan konsumsi. Kepada caleg juga disampaikan tentang uang saku peserta pertemuan. Beberapa oknum tim sukses biasanya akan merahasiakan jumlah uang saku ini agar tidak diketahui oleh peserta. Hal ini dilakukan agar nanti dana ini bisa dicubit sedikit.

Kesepuluh, setelah semuanya beres, tim sukses segera mencari tokoh untuk diangkut ke tempat acara. Untuk memudahkan, biasanya mereka mengajak beberapa orang ketua pemuda, kepala desa dan beberapa orang teungku. Jika teungku tidak ditemukan, maka mereka bisa mencari orang-orang yang wajah dan pakaiannya mirip teungku. Kepada

orang-orang ini akan disampaikan bahwa acara tersebut hanya ceramah politik biasa, tugas mereka hanya mendengar saja. Agar oknum-oknum tokoh ini bersemangat, mereka menjanjikan bahwa dalam acara ini disediakan uang saku, dan nanti kalau caleg itu terpilih mereka bisa memasukkan proposal. Kemudian, pada saat acara berlangsung, oknum tim sukses tidak lupa *menyetel* beberapa tokoh tersebut untuk menyampaikan kepada caleg bahwa dia sangat berpotensi untuk menang. Informasi bohong ini penting diketahui oleh caleg agar ia semakin percaya kepada tim sukses.

Kesebelas, biasanya kalau pertemuan dengan tokoh ini sukses, si caleg akan mengundang tim sukses secara khusus ke rumahnya. Sampai di sana dia akan menepuk bahu tim sukses dan memberikan sejumlah bonus. Oknum tim sukses yang cerdas tidak akan lupa menggunakan kepercayaan ini untuk memasang tipuan selanjutnya. Mereka segera mengusulkan untuk persiapan saksi menjelang pileg. Untuk tahap pertama akan diminta dana perekrutan saksi, kemudian biaya pelatihan saksi. Sebagai saksi cari, oknum tim sukses kemudian mencari anak muda “pengangguran” di kampung, pasti mereka bersedia. Untuk pelatihan saksi dilakukan hanya dengan pertemuan kecil saja demi menghemat anggaran.

Keduabelas, menjelang pileg, tim sukses segera memanggil saksi untuk dipertemukan dengan caleg. Ini penting agar si caleg tidak ragu atas kerja tim sukses sehingga ia pun akan berani mengeluarkan sejumlah dana untuk biaya saksi. Tapi, kepada para saksi, beberapa oknum tim sukses tidak akan pernah menyampaikan berapa total biaya saksi

yang diberikan caleg. Hal ini dilakukan agar nantinya dia bisa memotong dana saksi tanpa diketahui oleh saksi dan caleg sendiri. Untuk kelancaran kegiatan, oknum tim sukses ini juga meminta mobil operasional plus BBM dari caleg untuk mengontrol kerja saksi di hari H.

Ketigabelas, pada hari H beberapa oknum tim sukses memilih menjaga jarak dengan caleg. Kalau perlu mereka merantau sejenak ke luar kota. Dari sana mereka melakukan pemantauan dengan cara menelepon para saksi setelah penghitungan suara. Jika si caleg menang, maka secepat kilat tim sukses menjumpai caleg untuk melaporkan kesuksesannya. Tapi, seandainya terjadi kecelakaan sehingga caleg kalah, maka mereka segera mematikan HP dan melanjutkan perantauan. Tentunya selama menipu caleg beberapa bulan, atau mungkin setahun, modal mereka sudah lebih dari cukup. Bukan tidak mungkin, dengan modal itu, lima tahun ke depan dia bisa mencalonkan diri sebagai caleg tanpa bisa ditipu oleh siapa pun, sebab dia sendiri sudah berpengalaman menipu.

Perubahan Caleg Pasca Terpilih

Sebagai manusia biasa, caleg juga akan mengalami perubahan gaya hidup pasca terpilih sebagai anggota dewan terhormat. Setelah terpilih sebutan caleg pun akan berganti menjadi aleg (anggota legislatif). Perubahan nama ini kemudian mengakibatkan perubahan-perubahan lainnya, baik disengaja, tidak sengaja atau terpaksa.

Perubahan gaya hidup caleg bisa terjadi cepat atau pun lambat. Sebagian oknum caleg langsung menampilkan sikap berbeda di awal-awal kemenangannya. Caleg serupa ini termasuk dalam kategori tidak taktis alias latah. Dengan kata lain terlalu panik. Sementara itu sebagian oknum caleg lainnya akan menampilkan perubahan beberapa lama setelah ia terpilih, paling lama dua tahun setelah menjadi anggota dewan. Model ini biasanya dilakoni oleh caleg yang sudah berpengalaman alias caleg kawakan.

Untuk tahap pertama para oknum caleg akan menampilkan perubahan di hadapan para pemilihnya alias masyarakat. Jika di masa pemilu si caleg terlihat gigih bercengkerama, bersenda gurau dan sok dekat dengan rakyat, maka pasca terpilih ia akan berusaha memisahkan diri dari keakraban palsu yang pernah ia geluti di musim pemilu. Ia akan kembali menemukan kesadarannya yang telah diistirahatkan di musim pemilu.

Si oknum caleg ini akan memosisikan dirinya sebagai orang terhormat dengan cara mengungsi dari keramaian. Jika dulu dia memasuki lorong-lorong terpencil untuk sekadar

menyetor senyum kepada rakyat, pasca menjadi anggota dewan dia akan mengurung diri karena takut rakyat akan membalas senyumnya. Ia akan menjadi “sufi” untuk lima tahun ke depan.

Di musim-musim pemilu ramai caleg (mungkin oknum) yang terkenal dermawan dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Saat itu ramai juga caleg yang bersedia hadir di pesta dan kenduri-kenduri kecil di pelosok kampung lengkap dengan papan bunga. Pasca pemilu, mungkin karena harus menyesuaikan diri dengan tugas-tugas baru di parlemen, tidak sedikit oknum caleg yang kemudian berubah menjadi pelit dan malas memenuhi undangan dengan dalih sibuk mengurus rakyat. Dengan kata lain, para oknum caleg ini sadar bahwa sok dermawan dan sok peduli itu hanya cocok di musim pemilu.

Perubahan gaya hidup caleg di hadapan rakyat ini biasanya berlangsung di tahun pertama atau tahun kedua setelah pantatnya menyentuh kursi parlemen. Setelah perubahan gaya hidup di hadapan rakyat dianggap selesai, biasanya akan dilanjutkan dengan perubahan di hadapan tim sukses.

Di tahun-tahun pertama pasca terpilih, walau pun telah berhasil mengatur jarak dengan rakyat, namun para oknum caleg biasanya akan tetap menjaga kemesraan dengan para tim suksesnya. Caleg-caleg profesional tidak akan memutuskan hubungan dengan tim sukses di awal-awal kesuksesannya, karena dia paham tindakan tersebut akan berakibat fatal.

Perubahan gaya hidup caleg di hadapan tim sukses biasanya berlangsung di tahun kedua. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurangi pertemuan dengan tim sukses dengan alasan kesibukan di gedung parlemen. Langkah selanjutnya menonaktifkan nomor handphone lama dan mengaktifkan nomor baru yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Dia akan merahasiakan tindakan ini sampai ada tim sukses yang bertanya. Jika ada tim sukses yang bertanya, maka dia akan menjawab hpnya rusak atau hilang.

Caleg-caleg profesional paham bahwa interaksi yang terlalu lama dengan tim sukses pasca terpilih akan sangat menguras waktu dan isi kantong. Hal ini didasari oleh sikap sebagian oknum tim sukses yang menjadikan anggota dewan sebagai mesin ATM berjalan. Kondisi ini sering menyebabkan si caleg kebingungan karena dia harus menyediakan pulsa, uang kopi dan biaya beli koyok kepada para tim sukses. Berdasarkan alasan-alasan itulah pasca terpilih si caleg akan berusaha mengubah gaya hidupnya di hadapan tim sukses.

Namun demikian, biasanya si oknum caleg akan tetap “memelihara” beberapa tim sukses khusus yang dianggap paling berpengaruh alias “pasukan turbo.” Jumlahnya tidak banyak dan paling banyak cuma lima atau sepuluh orang. Beberapa orang penting ini akan terus dijaga dan dilayani sampai masa jabatan si anggota dewan habis untuk kemudian mengatur strategi baru guna memperoleh kemenangan pada pemilu berikutnya.

Cukup lihai, bukan?

Caleg dan Strategi Klasik

Kampanye adalah salah satu cara untuk memikat pemilih. Bagi caleg, kampanye merupakan agenda penting yang tidak boleh ditinggalkan. Jika tidak siap berkampanye maka lebih baik berhenti menjadi caleg.

Karena zaman terus berubah, para caleg juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga tidak terjebak dalam model kampanye klasik yang sudah tidak lagi efektif. Model kampanye harus terus diperbarui dari masa ke masa.

Berikut ini adalah beberapa bentuk kampanye dan strategi klasik yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman:

Pertama, sok dermawan di kedai kopi. Dulu, atau mungkin berpuluh-puluh tahun lalu kampanye serupa ini lumayan menarik perhatian masyarakat sehingga ramai caleg yang merasa mantap dengan model ini. Caranya adalah berkunjung ke kedai-kedai kopi dan kemudian berbasa-basi dengan pengunjung kedai. Setelah basa-basi dirasa cukup, si caleg lalu membayar harga kopi seluruh pengunjung. Aksi si caleg ini biasanya akan dipuji oleh masyarakat sehingga suaranya akan bertambah. Tapi, itu dulu! Untuk saat ini model kampanye tersebut sudah kedaluarsa. Uniknya, sekarang justru banyak caleg yang harga kopinya dibayar orang lain.

Kedua, bantuan untuk rumah ibadah. Dulu banyak oknum caleg yang ketika musim pemilu telah tiba berlomba-lomba membantu pembangunan rumah ibadah. Melalui bantuan

politis tersebut diharapkan suaranya akan bertambah. Seperti model pertama, model ini juga sudah “kuno.” Saat ini, seiring dengan kecerdasan pemilih, bantuan untuk rumah ibadah sudah tidak lagi efektif mendongkrak suara. Tapi kalau bantuannya ikhlas tetap akan mendapat pahala.

Ketiga, pertemuan dengan tokoh masyarakat. Pola ini terbilang hebat di masa lalu sebab tokoh masyarakat adalah sosok-sosok berpengaruh yang dapat merayu rakyat untuk memenangkan caleg dalam pemilu. Namun seiring perjalanan waktu dengan munculnya tokoh-tokoh “gadungan,” kepercayaan pemilih kepada tokoh pun telah memudar. Saat ini membuat pertemuan dengan sosok-sosok yang dianggap tokoh sudah terlalu kolot sebab kampanye yang disampaikan caleg akan berakhir di level mereka dan tidak akan otomatis berdampak pada pemilih. Demikian pula dengan biaya operasional yang dikeluarkan juga akan berhenti di level tokoh (oknum). Tapi untuk sekadar berteman dengan tokoh boleh-boleh saja.

Keempat, menjalin hubungan dengan perangkat desa. Banyak caleg yang percaya bahwa hubungan baik dengan perangkat desa dapat mempermulus usahanya memperoleh suara. Strategi ini memang cukup ampuh di masa lalu. Sementara untuk saat ini strategi tersebut sudah terlalu konyol untuk dipertahankan. Seperti diketahui, meskipun perangkat desa tidak boleh berpolitik, namun dalam praktiknya ramai oknum caleg yang menjalin kerjasama dengan oknum perangkat desa agar suaranya bertambah. Dalam konteks kekinian strategi ini sudah tidak efektif sebab perangkat desa

adalah sosok yang diburu oleh hampir seluruh caleg. Jika dipaksakan, bukan tidak mungkin para oknum perangkat desa akan “membagi-bagi” dukungan. Misalnya lorong A untuk caleg B dan lorong B untuk caleg A. Demikian seterusnya.

Kelima, hubungan dengan penyelenggara pemilu. Dulu ada beberapa kasus yang mencuat terkait keterlibatan oknum penyelenggara dalam kemenangan caleg tertentu. Dengan kata lain, di masa lalu strategi “pengamanan” suara melalui kerjasama dengan oknum penyelenggara terbilang efektif. Namun sejak munculnya media sosial strategi ini menjadi sangat berbahaya diterapkan sebab tiba-tiba saja akan viral sehingga hancurlah semua harapan.



**Bagian Keempat
Tim Sukes**



Makelar Pemilu

Secara sederhana dan singkat, istilah makelar dapat diterjemahkan sebagai perantara atau penghubung. Istilah tersebut juga serupa dengan agen atau pialang. Istilah makelar lazim digunakan dalam dunia perdagangan.

Meskipun kerap digunakan dalam dunia dagang, namun “pekerjaan” makelar juga sering ditemui dalam dunia politik, khususnya politik praktis alias pemilu. Perbedaannya cuma terletak pada kejujuran si makelar tersebut. Dalam dunia dagang, makelar adalah bagian dari profesi yang diakui sendiri oleh pelakunya. Sebaliknya, dalam dunia politik, khususnya dalam pemilu, si makelar justru berlagak sebagai bukan makelar.

Makelar perdagangan mencari keuntungan dari usahanya sebagai perantara dalam aktivitas dagang alias jual beli antarpihak. Hal serupa juga dilakukan makelar pemilu, di mana ia menjadi perantara yang menghubungkan politisi semisal caleg, cabup, cabup atau cawalkot dengan pemilih.

Idealnya seorang makelar pemilu bertindak sebagai tim sukses, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam melakukan aktivitasnya, makelar pemilu biasanya hanya menyamar sebagai tim sukses untuk mencari keuntungan dari politisi di musim pemilu. Menjelang pemilu, para makelar ini akan berkeliaran mencari mangsa. Mereka akan berusaha mendekati semua politisi, khususnya caleg untuk ditipu.

Berbeda dengan tim sukses yang fokus bekerja untuk caleg atau cabup tertentu, makelar pemilu justru mendekati seluruh caleg/cabup dengan mantra memukau sehingga semua mangsa pun terpukau. Caleg-caleg baru biasanya akan mudah tergoda dengan aksi makelar pemilu yang terlihat cukup profesional sehingga mereka pun mengeluarkan sejumlah dana kepada para makelar. Dan si makelar pun tersenyum karena telah sukses menipu.

Musim pemilu adalah lahan paling subur bagi seorang makelar politik. Dia akan mendapat keuntungan dari semua caleg yang berhasil ditundukkan lewat mantra-mantra.

“Pasukan” Penunggu Spanduk

Salah satu beban yang harus dikeluarkan caleg menjelang pileg adalah biaya cetak spanduk, baliho, banner dan kartu nama. Jumlah yang harus dikeluarkan untuk alat promosi ini sangat tergantung pada kondisi keuangan caleg itu sendiri. Ada caleg yang mengeluarkan dana dalam jumlah besar, ada yang sedang dan ada pula yang tidak mengeluarkan biaya. Oknum caleg yang disebut terakhir biasanya memilih “menumpang” di spanduk atau baliho caleg lain yang separtai dengannya. Selama keduanya sepakat tentu tidak ada persoalan.

Bagi caleg-caleg baru, keberadaan alat promosi ini tentu sangat penting agar dia bisa dikenal oleh masyarakat. Dengan memajang baliho atau spanduk di jalan, di pohon, di WC umum, di masjid atau di pagar rumah orang, maka wajah dan nama si caleg akan mudah dikenal.

Tentu tidak hanya caleg baru, caleg-caleg “legendaris” alias “kawakan” yang terus-terusan menjadi caleg pun masih membutuhkan alat promosi semisal banner atau spanduk agar wajah mereka tidak dilupakan.

Setelah mengeluarkan sejumlah uang untuk mencetak spanduk atau baliho, para caleg nantinya juga akan bertemu dengan para “penunggu” spanduk. Pasukan penunggu spanduk ini sering berkeliaran pada musim pileg. Tidak hanya menunggu bola, sebagian mereka juga menjemput bola dengan mengunjungi rumah-rumah caleg guna meminta spanduk plus biaya pemasangan.

Seperti sama-sama diketahui, para penunggu spanduk ini tidak hanya berhubungan dengan satu orang caleg, tapi mereka mengincar banyak caleg. Semakin ramai caleg yang bisa “digoda,” maka rezekinya semakin lancar.

Penting juga diketahui bahwa biaya pemasangan spanduk biasanya lebih mahal dari harga spanduk karena sudah termasuk “biaya keamanan.” Namun terkait harga ini masih bisa dinegosiasikan dengan para penunggu spanduk di TKP.

Para penunggu spanduk ini memiliki “wilayah kekuasaan” masing-masing. Dengan demikian, sebelum memasang spanduk, para caleg harus terlebih dahulu mencari tahu siapa “penunggu” yang berkuasa di daerah tersebut. Jangan pernah memasang spanduk sembarangan jika tidak ingin spanduknya hilang atau minimal bolong-bolong.

Dengan terbinanya kerjasama yang baik antara caleg dan penunggu spanduk, maka keamanan spanduk dan baliho pun lebih terjamin. Dan yang terpenting ada rezeki yang terbagi.

Lezatnya demokrasi kita!

Pemangsa Dana Kampanye

Bagi politisi semisal caleg, cabup, cawalkot, cagub sampai capres berserta calon wakil-wakilnya, musim pemilu tidak hanya menguras energi dalam bentuk kerja keras, tapi sekaligus menjadi wadah untuk menghabiskan sejumlah uang dalam arena kampanye. Untuk mencapai hasil yang maksimal tentunya biaya politik yang dikeluarkan pun harus maksimal pula.

Terlepas dari mana sumber-sumber dana itu, apakah uang pribadi, sumbangan atau hasil ngutang, yang jelas sejumlah biaya tersebut akan “hangus” atau lebih tepat “dihanguskan” di pentas politik. Jika si calon nantinya menang bukan tidak mungkin uang-uang yang sudah hangus itu akan disegarkan kembali melalui berbagai usaha yang sudah sama-sama kita mengerti. Sebaliknya, jika si calon itu kalah, maka ada dua keadaan yang harus diterima; jika ia sehat maka ia membayar utang-utangnya dan jika tidak sehat ia harus menginap di RSJ.

Lantas ke mana mengalirnya uang para politisi? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab sebab jawabannya akan terus berubah menyesuaikan diri dengan zaman dan kepandaian manusia. Namun demikian, dalam kaitannya dengan kontestasi politik praktis yang melibatkan banyak massa sebagai pemilih, posisi tim sukses alias “tenaga kerja kampanye” tentunya sangat penting.

Tim sukses sebagai perpanjangan tangan para politisi yang “ingin naik” memiliki peran besar dalam menyukseskan

tuannya di pentas politik. Salah satu peran yang tidak lelah-lelahnya dimainkan tim sukses (mungkin oknum) adalah memangsa dana kampanye.

Dalam praktiknya, oknum tim sukses yang berperan sebagai pemangsa dana kampanye tidak pernah peduli dengan nasib tuannya. Tugasnya adalah memangsa dan memangsa. Terus dan terus. Aksi memangsa dana kampanye ini biasanya dilakukan dengan sangat rapi dan penuh perencanaan sehingga si politisi terus “mabuk” dengan mantra-mantra yang dijampi oleh oknum tim sukses.

Akhirnya apa yang terjadi? Setelah pemilu, politisi harus mengurut dada karena mobil, rumah, sepeda butut sampai mas kawin telah hilang ditelan angin, sementara si pemangsa dana kampanye bersuka ria dengan mobil baru, rumah baru, sepeda baru sampai istri baru.

Cukup asyik, bukan?

Times Medsos

Saat ini kita dihadapkan pada pemandangan paling memuakkan, khususnya di media sosial. Pemandangan yang merusak akal sehat dan membunuh nalar. Akhir-akhir ini, kita menyaksikan rupa-rupa “kegilaan” yang dipamerkan para pendukung capres di media sosial. Sebak, semak dan memuakkan.

Di zaman *android* seperti saat ini, fenomena tersebut menjadi biasa saja. Saling ejek, saling serang dan saling cacimaki telah menjadi “tradisi baru” yang seolah mempertegas kadar kemodernan seseorang.

Dalam kaitannya dengan Pilpres 2019, perang medsos telah pun dimulai. Memang kita mengakui gerakan medsos adalah salah satu strategi baru paling efektif dalam kampanye politik. Penggunaan strategi perang medsos tidak hanya berlangsung di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lainnya. Strategi ini telah menjadi senjata baru untuk memenangkan pertarungan dalam kontestasi politik.

Namun demikian, pertarungan medsos menjadi tidak menarik ketika melibatkan oknum timeses berotak batu dan berhati kayu yang sama sekali sudah bercerai dengan akal sehat. Keterlibatan manusia-manusia serupa ini akan menyebabkan cacimaki melimpah dan melimpah ruah di hampir seluruh beranda media sosial sehingga bau amis pun menyeruak menyebar mengepung kewarasan.

Akhirnya, semua menjadi gila sebelum waktunya.

Timses Teler

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “teler” diterjemahkan sebagai kondisi tubuh yang lemas dan tidak berdaya karena pengaruh alkohol. Meskipun tidak semua orang melakukan pengecekan makna “teler” dalam KBBI, tapi dapat dipastikan hampir semua kita memahami arti dari kata tersebut. Kata ini sering digunakan dalam perbincangan sehari-hari sehingga ia pun menyatu dengan kehidupan kita.

Kata “teler” sering dilekatkan kepada sosok tertentu sebagai bentuk “ejekan” guna “merendahkan” sosok tersebut. Sampai saat ini tampaknya belum ada seorang pun yang menggunakan kata “teler” untuk memuji seseorang. Kata tersebut masih “kekal” pada makna asalnya dan belum mengalami pembelokan.

Kata “teler” digunakan hampir dalam semua bidang kehidupan, tak terkecuali dalam pentas politik praktis. Dalam dunia politik praktis istilah “teler” biasa disandingkan pada oknum politisi yang sering mengembuskan mantra omong kosong di musim-musim politik. Mereka adalah oknum politisi yang kehilangan keseimbangan dalam menjalankan aktivitas politiknya. Oknum politisi “teler” biasanya hanya mampu menebar janji dan gagal menepati janji itu ketika pantatnya telah menyentuh kursi kekuasaan.

Dalam dunia politik, kita juga akan berhadapan dengan beberap oknum tim sukses (timses) yang juga mengidap “teler.” Oknum serupa ini tidak hanya dijumpai di dunia nyata,

tapi juga menyemak dan bermukim di dunia maya. Oknum timses “teler” dapat dikenali melalui beberapa ciri-ciri yang terwujud dalam ucapan dan tingkah-lakunya.

Timses “teler” adalah mereka yang membela mati-matian “kesalahan” calon yang diusungnya. Dalam pembelaan buta ini mereka meninggalkan akal sehatnya demi menunjukkan kesetiaan kepada idola mereka. Tidak hanya membela calon yang diusungnya, tapi mereka juga memperteguh “kesilapan” dan “kekeliruan” yang dilakukan oleh teman-temannya.

Timses “teler” juga meninggalkan kewarasannya ketika memuji calon yang diusungnya. Mereka menyanjung idolanya dengan “penghambaan” yang “membabi-butu.” Calon yang diusungnya diposisikan sebagai manusia suci yang sejak lahirnya tanpa cela sedikit pun dan menghantam rival politiknya sebagai pendosa yang tak terampuni.

Timses “teler” menjalankan aktivitas politiknya dengan “perasaan” sembari membunuh “kewarasan.”

Pengamat Politik Medsos

Mencermati perkembangan terkini, tampaknya medsos di negeri kita telah benar-benar “dikuasai” oleh para “pengamat politik.” Indikasi ini dapat dengan mudah dilacak melalui komentar-komentar yang bertebaran di beranda media sosial, khususnya *facebook*. Komentar-komentar itu terus menyapa para pengguna media sosial tanpa kenal waktu; pagi petang, siang malam.

Para pengamat politik medsos ini terlihat pantang menyerah dan cukup bersemangat dalam melakukan analisis peta politik nasional, khususnya terkait kontestasi capres-cawapres. Para pengamat politik medsos tampak cukup serius dalam mengajukan argumen yang diyakininya sebagai benar. Uniknya lagi, semakin hari, para pengamat politik medsos ini pun semakin ramai.

Seperti halnya tim sukses capres-cawapres, para pengamat politik medsos ini juga terbelah ke dalam dua kubu politik; Jokowi dan Prabowo. Kenyataan inilah yang kemudian menjadikan para pengamat politik medsos menjadi “sama saja” dengan tim sukses, meskipun mereka tidak pernah mengaku dan bahkan sok independen.

Perbedaan antara pengamat politik medsos dengan tim sukses hanya pada argumen dan pola analisis dalam menunjukkan keberpihakan. Pengamat medsos pada umumnya mengedepankan sisi akademis dengan menghadirkan narasi yang seolah-olah ilmiah sehingga mampu memengaruhi

sasaran. Sementara para timses, dalam melakukan kampanye seringkali dilandasi oleh emosi sehingga bermuara pada apology yang terkadang menjijikkan.

Di era media sosial, siapa saja berpeluang untuk memosisikan dirinya sebagai pengamat politik di dunia maya. Lagi pula untuk menjadi seorang pengamat medsos tidak perlu mengikuti uji kompetensi atau tes dari lembaga tertentu. Siapa saja memiliki peluang yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Kehadiran para pengamat medsos akan berkonsekwensi pada semakin semaraknya kampanye pilpres di media sosial sekaligus memperlebar perdebatan antarkubu capres-cawapres. Tidak hanya itu, kehadiran pengamat medsos juga akan sangat membantu para tim sukses untuk meminjam argumen mereka sebagai bahan kampanye.



Bagian Kelima Money Politik



Antara Janji Politik dan Money Politik

Kenapa pemilih lebih menyukai *money politik* daripada janji politik? Sebelum menjawab pertanyaan ini baiknya kita telusuri dulu kenapa pertanyaan semisal ini bisa muncul ke permukaan.

Seperti diketahui, politisi dan janji politik adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Artinya kemunculan janji politik tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan politisi itu sendiri. Janji politik tidak akan pernah ada tanpa diawali oleh kemunculan politisi di pentas politik. Demikian pula dengan politisi, ia tidak mungkin eksis tanpa melemparkan janji-janji politik ke hadapan publik.

Dalam realitas politik kita di masa lalu, sebagian janji-janji politik yang dilontarkan oknum politisi dapat terpenuhi dengan baik pasca mereka duduk di pentas kekuasaan. Namun demikian, tidak sedikit janji-janji politik yang keluar dari mulut oknum politisi yang berbuih-buih itu kemudian lenyap diterbang angin dan hilang entah ke mana.

Lenyapnya janji-janji politisi yang terus berulang dari pemilu ke pemilu akhirnya memunculkan kejenuhan di benak publik. Seiring perkembangan waktu, kejenuhan demi kejenuhan ini menjelma menjadi rasa muak yang kemudian melahirkan sikap apatis dari publik. Akhirnya sebagian publik berasumsi bahwa janji-janji politik dari politisi hanyalah bualan belaka, hanya rayuan dan tipuan untuk menarik simpati demi meraih kursi. Tidak sedikit oknum politisi yang setelah

terpilih kemudian merevisi alias meralat atau mencampakkan janji-janjinya.

Dalam kondisi inilah sebagian masyarakat memilih “berhijrah” dari ketergantungan pada janji politik yang palsu alias omong kosong kepada praktik *money politik* yang lebih konkret. Janji-janji politik akan hilang dan lenyap begitu pemilu usai, sementara uang (*money politik*) terlihat lebih praktis dan memberi manfaat dalam seketika.

Dalam demokrasi kita, janji-janji politik hanya “sampah” penghibur hati. Janji politik adalah bujuk rayu untuk menggoda kesadaran publik. Namun dalam kenyataannya, janji politik selalu saja tergerus oleh waktu, kemudian kabur dan lenyap dari memori. Sementara uang begitu dekat dan akrab. Dengan demikian sudah sewajarnya ketika janji politik menemukan kepunahannya di tengah badai *money politik*.

Politik Uang, Salah Siapa?

Kita tentu tidak asing dengan istilah politik uang yang populer disebut *money politic*. Namun sampai saat ini kita belum menemukan informasi memadai sejak kapan politik uang ini dipraktikkan. Kita juga tidak tahu apakah ia muncul baru-baru ini atau telah menjadi “tradisi” sejak dari masa lalu. Saya pribadi menganggap tidak penting tentang apakah politik uang itu “tradisi” atau bukan. Yang penting diketahui adalah kenapa dan untuk apa politik uang itu dilakukan. Satu lagi, siapa yang patut disalahkan dengan munculnya praktik ini di pentas demokrasi.

Bagi politisi yang ingin tampil bersih di depan publik tentunya akan melakukan perlawanan keras terhadap berbagai bentuk politik uang yang dimainkan sebagian oknum. Sebaliknya, bagi politisi yang menganggap uang sebagai raja, praktik politik uang adalah senjata ampuh guna meraih kemenangan dalam kontestasi politik yang penuh intrik.

Dalam kenyataannya saat ini uang telah mampu “menundukkan” logika sebagian pemilih untuk kemudian meninggalkan nalar sehatnya dan beralih pada kegilaan materialistik. Dalam kondisi pemilih seperti inilah praktik politik uang menjadi efektif dan bahkan efisien untuk diterapkan. Dalam kondisi ini politik uang akan memberi dampak memuaskan bagi oknum politisi tertentu, sekaligus menghadirkan kenikmatan materialistik kepada oknum pemilih. Bagi masyarakat yang telah “menuhankan” materi

dan kenikmatan sesaat, praktik politik uang adalah tindakan wajar belaka, untuk tidak menyebutnya sebagai “wajib.”

Meskipun tidak melalui riset profesional, saya memiliki keyakinan bahwa politik uang dimulai oleh para oknum politisi itu sendiri. Merekalah yang mengajari rakyat dengan praktik politik uang sehingga dalam perkembangan selanjutnya rakyat pun tercerdaskan dan berubah wujud menjadi materialistik. Jika dulu politisi kesulitan melakukan praktik politik uang, maka sekarang oknum rakyatlah yang mengingatkan politisi agar tidak lupa memberikan uang kepada mereka, khususnya di musim-musim politik.

Karena praktik politik uang terus terjadi di sepanjang musim politik akhirnya ia pun menjadi semacam “tradisi” yang dianggap wajar. Bahkan, beberapa politisi yang pada awalnya dikenal bersih pun mulai tergoda melakukan trik politik uang demi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Akhirnya praktik politik uang telah menjelma sebagai sebuah strategi efektif untuk meraup suara dalam pemilu.

Kecuali itu, dalam penerapan praktik politik uang yang semakin kompetitif telah pula melahirkan sejenis “simbiosis mutualisme” antara politisi dan rakyat, di mana kedua pihak merasa sama-sama diuntungkan. Dengan demikian politik uang dapat terus memainkan peranannya dalam puji dan caci. Jika sudah begitu, siapa yang hendak disalahkan?

Trik Money Politik

Bagi sebagian oknum politisi, *praktik money politik* adalah strategi ampuh yang dipercaya dapat memberi kesuksesan untuk meraih kemenangan. Disadari atau pun tidak, praktik ini terus saja terjadi di negara kita dari masa ke masa.

Dalam kenyataannya ramai oknum politisi yang berhasil mencapai impiannya melalui strategi ini. Namun tidak sedikit pula yang gagal. Keberhasilan yang diperoleh oleh beberapa gelintir oknum politisi melalui aksi *money politik* ini kemudian turut mendorong oknum politisi lainnya untuk mencoba strategi yang sama.

Bagi sebagian politisi yang masih menjunjung moral, mereka akan menolak dan bahkan melawan segala bentuk praktik money politik dalam pemilu. Sebaliknya, bagi oknum politisi “immoral” praktik *money politik* adalah satu-satunya jalan paling efektif yang mau tidak mau harus ditempuh.

Melihat beberapa kegagalan yang dialami oleh sebagian oknum politisi dalam menjalankan strategi *money politik*, berikut ini akan diuraikan beberapa langkah yang mungkin saja ditempuh oleh beberapa oknum agar praktik ini bisa berlangsung lancar dan aman.

Pertama, menjamin stok uang yang cukup. Ini adalah poin paling penting yang harus dipenuhi, sebab tanpa uang *praktik money politik* tidak mungkin dijalankan. Uang ini bisa bersumber dari mana saja seperti uang tabungan di bank,

hasil menjual tanah, hasil korupsi, hasil menipu orang atau pun uang hasil utang.

Kedua, mempersiapkan tim sukses. Sebagai seorang politisi yang harus tetap menjaga kehormatan, tentunya tidak mungkin jika ia membagikan uang secara langsung kepada calon pemilih. Dengan demikian agar kerja *money politik* ini dapat dijalankan, maka politisi butuh kepada tim sukses. Nantinya tim sukses inilah yang bekerja membagi uang di lapangan.

Ketiga, pelatihan tim sukses. Seperti telah disinggung, tim sukses adalah penentu sukses tidaknya praktik *money politik*. Oleh sebab itu, sebelum beraksi, tim sukses biasanya akan dilatih dengan serius tentang tatacara membagi uang dan metode memilih sasaran. Hal ini sangat penting mengingat kekeliruan tim sukses akan berdampak fatal bagi oknum politisi. Bayangkan saja bagaimana jadinya jika tim sukses justru membagi uang kepada masyarakat di luar daerah pemilihan atau kepada tim sukses politisi lain, tentunya kondisi akan semakin runyam.

Keempat, memberi gaji besar kepada tim sukses. Persoalan gaji sangat penting diperhatikan agar kerja-kerja tim sukses dapat berjalan lancar. Gaji yang layak dan besar akan membuat tim sukses tetap bersemangat. Gaji yang kecil biasanya akan mendorong tim sukses melakukan tindakan korupsi dengan cara mencubit uang yang akan dibagikan kepada oknum pemilih. Jika hal ini terjadi maka *money politik* tidak akan efektif karena jumlah uang yang diterima oleh pemilih akan

berkurang dan berbeda satu sama lain sehingga menimbulkan cekcok. Kejadian ini sangat berbahaya dan akan dengan mudah terendus oleh pengawas pemilu.

Kelima, mengamankan penerima uang. Pengamanan penerima uang sangat diperhatikan oleh oknum politisi yang akan melakukan praktik *money politik*. Seperti diketahui, praktik *money politik* adalah tindakan melanggar hukum. Oknum politisi profesional biasanya akan melakukan langkah-langkah pengamanan agar praktik *money politik* berlangsung aman. Salah satu caranya adalah dengan mendaftarkan para oknum calon penerima uang sebagai bagian dari tim sukses. Dengan kata lain, nama-nama penerima uang dimasukkan dalam daftar tim sukses yang di SK-kan oleh si politisi. Dengan pola ini maka tuduhan *money politik* akan sulit dibuktikan, sebab memberikan uang kepada tim sukses termasuk dalam kategori biaya politik, bukan *money politik*.

Keenam, distribusi uang dilakukan secara tertutup. Pola distribusi ini juga sangat menentukan sukses tidaknya praktik *money politik*. Jika tidak hati-hati, bukan tidak mungkin aksi *money politik* akan mudah tercium oleh lawan politik yang tentunya akan berdampak fatal. Di antara waktu yang lumayan efektif untuk distribusi adalah menjelang magrib atau setelah waktu subuh.

Ketujuh, sebisa mungkin si politisi berusaha memberi kesan kepada masyarakat umum bahwa ia anti kepada *money politik*. Salah satunya dengan menulis pesan di baliho besar di pusat kota bahwa “Money Politik Haram.” Ini adalah bentuk

pengelabuan agar si politisi dimaksud terbebas dari tuduhan *money politik*.



**Bagian Keenam
Pilpres 2019**



Menyambut Pilpres 2019, Medsos Semakin “Gila”

Pasca para capres/ cawapres mendaftarkan diri ke KPU, media sosial mulai “menyemak” dengan rupa-rupa kampanye pra pemilu. Kedua belah pihak pendukung tampak saling mengintip kelemahan pihak “lawan” untuk kemudian “digoreng” di media sosial.

Jika perang di alam nyata menggunakan senjata mulai dari pisau, parang, Ak-47, meriam, bom atom dan sebagainya – di media sosial perang dilancarkan melalui meme, video, foto dan artikel yang telah diolah sedemikian rupa untuk saling menghantam satu sama lain.

Di musim pilpres, gendang perang media sosial terus ditabuh dengan gemuruh semarak bertalu-talu. Terompet dan alarm perang pun melengking memekak telinga. Perang dimulai! Aktivis medsos dari masing-masing kubu telah siap dengan beragam amunisi. Masing-masing membidik lawan dari berbagai penjuru. Siapa lengah dia jatuh, siapa kuat dia menang. Bergerak cepat!

Perang media sosial bukan perang biasa. Bukan perang-perangan. Bukan pura-pura. Tapi perang paling mengerikan. Perang media sosial adalah perang yang akan menyingkirkan pikiran dan membunuh akal sehat.

Serbu!

Sandiwara Politik Kita

Setelah Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf resmi mendaftar ke KPU, untuk sementara, segala bentuk diskusi hebat terkait posisi cawapres sudah selesai. Beberapa tokoh yang selama ini diunggulkan sebagai cawapres, tapi gagal terpilih, tentu harus berpuas diri. Sebab politik memang begini, sulit ditebak.

Seperti diketahui, hanya ada dua cawapres yang bisa diusung, mengikuti capres yang hanya dua orang. Kondisi ini menyebabkan ramai cawapres yang gagal “bermimpi.”

Di negara demokrasi, kondisi semacam ini terbilang wajar, bahkan sangat wajar. Tidak ada yang aneh. Semua boleh berlomba, tapi kesuksesan sangat tergantung pada perjuangan dan juga garis nasib.

Di negeri demokrasi ini, siapa cepat dia dapat, siapa lambat dia “berkulat.” Demikian pula dalam soal modal. Pemilik modal tetap saja memiliki kendali dalam dunia politik.

Sepintas, kita memang merasa “kasihan” melihat beberapa cawapres gagal yang balihonya terpampang hampir di setiap sudut desa dan kota. Entah berapa banyak uang sudah terbuang. Tapi, bagi mereka, itu biasa saja. Demokrasi memang begini.

Demikian pula dengan keriuhan dalam beberapa tahun terakhir melalui aksi demonstrasi dengan isu begini dan begitu. Isu agama, nasionalisme dan komunisme tampak terbang liar kian ke mari. Tapi, semua bisa saja hilang seketika dihempas

aroma demokrasi yang selalu dinamis. Saling hujat, ceci maki, *bully* dan entah apa-apa lagi pun bisa muncul dan lenyap tiba-tiba. Semua bisa saja terjadi di alam demokrasi.

Yang dulunya mengangkat isu agama, bisa saja kemudian beralih pada isu lain. Yang dulunya “anti” pada isu agama, bisa balik mengadopsi.

Kita terus bersandiwara dalam tangis dan tawa kepalsuan. Beginilah sandiwara politik kita. Demokrasi kita.

Nomor Urut Capres dan “Mufassirin”

Baru-baru ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dikabarkan telah mendapatkan nomor urut masing-masing. Sesuai namanya, nomor itu sudah pasti berurutan. Karena hanya ada dua calon, nomor yang tersedia juga cuma dua. Masing-masing pasangan calon akan mendapatkan satu nomor yang pastinya berbeda satu sama lain.

Menurut informasi, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat nomor urut 1 dan Prabowo-Sandi memperoleh nomor urut 2. Tentu tidak ada yang aneh dengan nomor yang berbeda ini. Keanihan baru muncul jika kedua pasangan mendapat nomor yang sama.

Dalam sebuah kontestasi, nomor urut hanya sebagai penanda belaka dan sama sekali bukan urutan dalam pengertian keberuntungan. Sejauh ini tampaknya belum ditemukan riset terkait hubungan nomor urut dan keberuntungan.

Namun demikian, di pentas politik praktis, para tim sukses masing-masing pasangan akan tetap mencoba menafsirkan nomor urut tersebut dengan narasi -narasi yang dianggap menguntungkan kubu mereka. Aktivitas tafsir menafsir ini tentunya wajar saja.

Yang mendapat nomor satu akan berupaya menafsirkan nomor ini sebagai simbol kemenangan. Tidak jarang para penafsir juga “membajak” ayat-ayat kitab suci guna menjustifikasi penafsirannya. “Nomor satu simbol *tauhid*” adalah salah satu contoh penafsiran “bajakan.” Bukan tidak

mungkin, pemegang nomor satu ini juga akan menafsirkan nomor urut rivalnya sebagai simbol “kesyirikan” karena telah “menduakan” Tuhan dan seterusnya.

Demikian pula dengan tim sukses dari nomor urut dua juga akan menafsirkan nomornya sekuat mungkin. Peluang “pembajakan” juga terbuka. Sebagai misal, “Nabi telah meninggalkan dua pegangan, yaitu al-Qur’an dan Hadits. Jadi dua ini harus kita pegang.” Ini adalah contoh penafsiran bajakan yang mengaitkan nomor mereka dengan agama. Selanjutnya, mereka juga bisa menafsirkan secara negatif nomor urut lawannya sebagai “cukup satu kali” dan seterusnya.

Membukukan Kegilaan Pendukung Capres

Menjelang Pilpres 2019 kita dipaksa berhadapan dengan banyak sekali kegilaan. Rupa-rupa kegilaan ini dapat dengan mudah kita lacak dan temukan di media sosial. Seperti kita tahu, media sosial adalah museum terbesar yang merekam jejak perjalanan manusia di zaman ini. Tak perlu riset, sebab dugaan ini cenderung benar.

Melalui media sosial kita benar-benar dipaksa menjadi penonton yang saban hari harus duduk manis sembari menatap episode-episode kegilaan yang tak ada habis-habisnya. Mungkin ada yang sok bijak meminta agar akun penyebar kegilaan kita blokir. Ini mustahil, sebab kita juga harus memblokir akun kita sendiri.

Untuk kategori pendukung capres misalnya; mereka sama-sama menghadirkan kegilaan. Yang satu menyebut yang lain gila, saling tunjuk dan saling tuding. Mereka tidak sadar kalau keduanya sama gilanya. Kelompok yang satu mendukung ganti presiden dan kelompok lainnya tidak bersedia presidennya diganti.

Perdebatan antarpenggila ini berlangsung hampir di seluruh jengkal tanah Indonesia. Satu pihak menggelar aksi ganti presiden sementara pihak lain datang mengadang. Satu pihak menuduh gerakan ganti presiden sebagai makar sementara pihak lain menuding penuduh sebagai otoriter dan tidak demokratis.

Aceh yang selama ini terlihat santai pun sudah mulai tergoda dengan aksi-aksi di luar sana. Semuanya berawal dari media sosial yang kemudian menemukan wujudnya di alam nyata. Uniknya kemarin beredar video di media sosial terkait aksi ganti presiden. Saya menyebut unik sebab terjadi di Aceh. Dalam video itu beberapa orang betopeng mencoba menggertak kelompok ganti presiden yang kononnya akan menggelar aksi di Aceh. Belum lagi sampai satu hari, muncul pula video tandingan yang mengecam kelompok bertopeng. Lawak?

Terlepas dari apa yang terjadi, saya berkesimpulan bahwa kegilaan-kegilaan ini patut dicatat dan dibukukan dengan rapi. Gumpalan-gumpalan kegilaan menjelang Pilpres 2019 akan menjadi penanda bahwa kita semua pernah merasakan kegenitan demokrasi yang tiada tara.

Seratus tahun nanti, catatan-catatan ini akan menjadi hiburan bagi anak cucu kita. Catatan ini akan menjadi warisan terbesar yang akan diperebutkan oleh generasi Indonesia satu abad ke depan.

Dari catatan inilah mereka akan belajar bagaimana caranya kegilaan itu dirawat.

Menertawakan Ratna Sarumpaet

(I)

Pada Oktober 2018 lalu, media sosial di Indonesia heboh dengan dugaan penganiayaan yang dialami salah seorang aktivis berkelamin wanita bernama Ratna Sarumpaet. Menurut informasi yang berkembang sebelumnya, Ratna diduga dipukuli oleh OTK di kawasan bandara. Salah satu bukti yang diajukan adalah kondisi wajah Ratna yang terlihat bengkak dan memar.

Menyikapi informasi menggemparkan itu, berbagai spekulasi pun bermunculan. Spekulasi liar itu sempat menjalar-jalar di media sosial. Karena dalam musim politik menjelang pilpres, ada pula spekulasi yang mengaitkan kejadian tersebut dengan kontestasi politik yang sedang berlangsung.

Tidak lama kemudian kondisi tiba-tiba saja berubah. Sejumlah media yang sebelumnya berlomba-lomba menyiarkan dugaan pemukulan terhadap Sarumpaet tampak berbalik haluan. Mulai hari itu, sejumlah media justru berlomba-lomba mengabarkan aksi pemukulan dan penganiayaan itu sebagai *hoax*.

Perubahan alur berita di sejumlah media diawali oleh kecurigaan sejumlah pihak terhadap kasus yang menimpa Sarumpaet. Kecurigaan tersebut kemudian bermuara pada munculnya pengakuan Sarumpaet bahwa kabar yang terlanjur berkembang itu adalah *hoax*.

Meskipun saat itu ramai kalangan yang telah meralat kesimpulannya, namun bukan tidak mungkin besok atau lusa akan muncul temuan baru yang akan menganulir temuan hari ini sehingga kehebohan baru pun bermunculan kembali. Menyimak kondisi politik kekinian, tampaknya gerak perubahan akan terus melaju. Masih banyak kehebohan yang belum terungkap.

Kita tunggu saja.

(II)

Dalam tulisan ini saya tidak akan mengulas tentang siapa sosok Ratna Sarumpaet yang menghebohkan jagat maya baru-baru ini. Informasi tentang sosok Sarumpaet dapat dengan mudah dilacak melalui bantuan mesin pencari bernama Google. Di sana riwayat dan hikayat tentang Sarumpaet lumayan menyemak. Yang jelas, Ratna Sarumpaet sudah populer di tanah air jauh sebelum media sosial ditemukan.

Tulisan ini hanya sekadar medium pengingat diri agar tidak terperosok ke dalam lubang kehinaan. Apa yang dialami oleh Ratna Sarumpaet hari ini bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Terlepas apakah Sarumpaet benar-benar berbohong atau tidak, yang jelas semua kita, khususnya politisi memiliki peluang yang sama untuk jatuh ke kubang kebohongan.

Agama dan akal memang melarang kita untuk berbohong, tapi terkadang nafsu membuat kita lengah sehingga teperdaya dengan bujuk rayunya. Dalam kondisi inilah kebohongan menemukan wujudnya, baik secara sadar atau pun tidak. Jika

kewarasan masih tersisa, biasanya penyesalan akan segera datang. Sebaliknya jika hati tebal, maka yang muncul hanya pembelaan atas kebohongan dengan lahirnya kebohongan baru.

Sekali lagi, terlepas apakah pengakuan Sarumpaet atas kebohongannya itu benar atau tidak, yang jelas dia masih menyisakan kewarasannya dengan meminta maaf secara terbuka kepada publik. Dengan demikian segala bentuk “kelatahan” menjadi tidak layak dipertontonkan. Respons yang berlebihan hanya akan menjadi lelucon yang sama sekali tidak lucu.

Dengan menafikan apakah insiden hoax tersebut berada dalam ruang rekayasa politik atau tragedi alamiah, yang jelas tindakan menertawakan Sarumpaet sama halnya dengan meludah ke atas. Diyakini atau tidak, di era informasi yang serba bebas seperti sekarang ini, terbongkarnya sebuah kebohongan hanya soal giliran.

Terbongkarnya kebohongan orang lain seharusnya menjadi medium bagi kita untuk mengevaluasi diri. Bukan justru menertawakan, sebab menertawakan kebohongan orang lain akan membuka jalan bagi terbongkarnya kebohongan kita, cepat atau lambat.

Media Partisan

Idealnya media massa bertugas memberi pencerahan kepada publik, bukan justru melakukan penyesatan. Tapi, seperti kita lihat dan rasakan bahwa idealita tak selamanya sejalan dengan realita. Dengan kata lain, harapan dan kenyataan tak selamanya berpadu dan justru beradu.

Di masa lampau kita hanya mengenal media cetak semisal majalah dan koran. Dalam perkembangan dunia yang semakin modern kita kemudian dikenalkan dengan media elektronik dan televisi. Zaman terus bergerak. Sejak kemunculan internet, masyarakat dunia kembali berkenalan dengan media online. Awalnya media berbasis online ini tidak begitu dikenal dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu yang memiliki fasilitas komputer.

Kemajuan teknologi terus berjalan dan saat ini kita dihadapkan pada banjirnya media online di tanah air. Kondisi ini didukung oleh perkembangan masyarakat yang sebagian besarnya telah memiliki *hand phone* pintar sehingga keingan mereka untuk mengakses informasi semakin besar.

Perjalanan teknologi terus berlanjut dengan kemunculan media sosial sehingga “semua orang” pun telah menjadi pewarta bagi sesamanya. Mereka tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi tapi dalam waktu bersamaan telah pula menjadi produsen informasi.

Saat ini media sosial telah menjadi media alternatif untuk mengakses dan menyebarkan informasi kepada publik. Kondisi

ini turut didukung oleh “penyimpangan” yang dilakukan beberapa “oknum” media maenstream yang “menyesatkan” publik dengan informasi “takhayul” dan “khurafat.”

Saat ini, khususnya di Indonesia sebagian media dimiliki oleh politisi. Fakta ini tentunya bukan hal baru dan tidak aneh, sebab media bisa dibuat oleh siapa saja selama ia mampu memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang.

Namun demikian sangat disayangkan jika media yang sebelumnya dikenal “bersih” sudah terkontaminasi dengan kepentingan politik kelompok tertentu sehingga media tersebut menjadi partisan. Kondisi ini tentunya tidak hanya memuakkan, tapi juga menjijikkan. Namun demikian kita tidak sepenuhnya menyalahkan oknum-oknum media tersebut, sebab semua butuh makan.

Dalam kondisi ini bukan oknum media itu yang salah, tapi kita yang “kurang ajar” sebab masih menaruh kepercayaan kepada mereka.

Debat Capres Pakai Bahasa Isyarat

Perkembangan kontestasi politik menjelang Pilpres 2019 tampaknya semakin menggila. Kesimpulan ini tentunya tidak berlebihan jika kita mencermati kelakuan dan gelagat tim sukses dari kedua kubu yang saling berseberangan. Kewarasan tampaknya sudah semakin tergerus di tengah optimisme yang meledak-ledak.

Kedua belah kubu yakin bahwa pasangan merekalah yang akan memenangkan “pertarungan” memperebutkan kursi kekuasaan untuk lima tahun ke depan. Kedua belah kubu mengaku paling kuat, paling cerdas, paling alim, paling milenial, paling keren, paling “berkualitas,” paling dicintai oleh rakyat dan sejuta kepalingan yang tak terhitung. Kedua belah kubu saling tarik-menarik bahwa merekalah yang paling “paling.”

Di tengah kewarasan yang semakin kurus, ide-ide konyol pun bertaburan di udara; dihempas dan ditangkap sendiri. Melucu sendiri dan tertawa sendiri. Mereka pelawak dan mereka pula yang menjadi penonton yang sok terpingkal dengan leluconnya sendiri. Kekonyolan paling konyol yang tidak pernah mereka sadari di tengah pengakuan bahwa merekalah pihak yang paling sadar atas ketidaksadaran. Ada gila?

Baru-baru ini, seperti dilaporkan “wartawan *facebook*” yang telah menguasai pikiran dari setengah penduduk bumi di abad ini – telah muncul perdebatan antarkedua pihak

terkait debat pilpres nantinya. Satu pihak mengajukan debat menggunakan bahasa Inggris dan satu pihak meminta debat bahasa Arab. Kelahiran ide konyol ini tentunya bukan tanpa alasan. Yang meminta debat bahasa Inggris mungkin Inggrisnya *excellent* dan yang menghendaki bahasa Arab bisa jadi bahasa Arabnya *muntaẓ*.

Tapi mereka tidak sadar bahwa ide serupa itu semakin mempertegas kekonyolan. Yang sebelah sini menduga sebelah sana tak bisa bahasa Inggris dan yang sebelah sana meyakini sebelah sini tak mampu bahasa Arab. Akhirnya bertemulah dua kekonyolan yang saling bertubrukan. Sama saja seperti meminta ayam mengembek dan kambing berkokok. Siapa gila?

Jika kewarasan terus dibiarkan sekarat, maka bukan tidak mungkin akan muncul ide untuk debat pilpres menggunakan bahasa isyarat atau mungkin bahasa Sanskerta atau pakai bendera semaphore atau sandi morse pakai peluit. Silakan pilih!

Sales Capres

Sampai dengan tulisan ini selesai ditulis, saya belum berhasil menemukan kata *sales* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya justru menemukan kata *salai* yang berarti ikan panggang atau pisang yang dijemur di bawah terik matahari. Tentu makna tersebut tidak cocok dengan maksud saya. Akhirnya saya mencoba membuka kamus bahasa Inggris. Di situ kata *sales* dimaknai sebagai penjualan. Ada pun penjual dinamakan dengan *salesman*, bukan sales.

Saya sengaja melakukan pencarian kata tersebut guna pertanggungjawaban istilah yang akan saya gunakan dalam tulisan ini. Seperti kita lihat, dengar dan tahu, di Indonesia kata *sales* sering dipahami sebagai sosok yang suka merayu pelanggan untuk membeli barang tertentu. Biasanya mereka datang ke rumah-rumah atau ke toko untuk menawarkan barang seperti hp, televisi, kulkas, sofa sampai rokok.

Untuk dapat menjadi sales tentu tidak mudah. Butuh keberanian dan latihan yang intens. Jika tidak, maka kita akan kalah gagah dengan pelanggan sehingga harus pulang dengan harapan kosong. Mirisnya lagi kalau kita sedang mengalami masa training, kegagalan memasarkan produk bisa berakibat pada gagalnya kontrak kerja.

Sebab itu saya menaruh salut dan kagum kepada para sales yang mampu memengaruhi pelanggan dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Sales adalah sosok-sosok tangguh dan perkasa. Mereka adalah manusia-manusia istimewa dan

pribadi-pribadi hebat. Saya pribadi tidak mampu menggeluti profesi ini. Terlalu berat, khususnya bagi tipikal pemalu seperti saya, dan juga Anda, mungkin.

Selama ini profesi sales identik dengan produk, baik dalam bentuk barang atau pun jasa. Tapi dalam konteks kekinian, istilah yang identik dengan hal tertentu sering pula diplesetkan sehingga ia pun keluar dari habitatnya. Di musim pilpres ini, istilah sales pun telah keluar dari habitatnya dan mulai masuk dalam dunia politik.

Beberapa hari lalu saya menemukan istilah sales capres di facebook. Saya tidak ingat siapa yang pertama kali menulis istilah tersebut. Entah Risman Rachman, entah siapa saya lupa. Tapi yang jelas istilah “sales capres” telah “memaksa” saya untuk menulis artikel ini. Istilah tersebut lumayan menarik perhatian saya dan sejauh ini tampaknya belum begitu populer.

Pada prinsipnya saya tidak sepakat dengan penggunaan istilah “sales capres” sebab istilah tersebut telah mengalami peyorasi sehingga makna “sales” cenderung termarjinalkan. Namun demikian frasa ini mengandung pesan moral yang layak didiskusikan karena mampu menyentak kesadaran terdalam bagi siapa saja yang mendedikasikan diri dalam kontestasi pilpres. Dengan pertimbangan inilah saya “memaksa diri” untuk turut menggunakan frasa tersebut tanpa bermaksud “memarjinalkan” profesi sales.

Seperti kita lihat sendiri, saat ini media sosial telah menjadi salah satu medium tempat “berkembang-biaknya” hikayat kampanye dari para pendukung capres. Para pendukung

capres ini sebagiannya adalah tim sukses resmi yang dibentuk oleh masing-masing capres. Di luar tim resmi ini juga ramai netizen yang mengidolakan capres tertentu dan terlibat dalam kampanye medsos. Mereka tampak mendominasi kampanye di media sosial. Mereka inilah yang kemudian akan kita sebut sebagai sales capres.

Para sales capres ini memainkan berbagai strategi dan melemparkan berbagai isu melalui ulasan dan komentar di media sosial. Tiba-tiba saja para sales capres ini menampilkan diri sebagai pakar-pakar dadakan yang seolah menguasai segala bidang, mulai ekonomi, pertanian, kelautan, perminyakan, perdagangan, pendidikan sampai pakar agama sekali pun. Para sales capres ini menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mengampanyekan idolanya di media sosial.

Tidak jarang para sales capres ini saling bertengkar satu sama lain dalam mempertahankan argumennya. Seolah-olah para capres dan cawapres adalah ayah, oom, abang atau paman mereka yang harus mereka bela mati-matian. Tidak sedikit dari para sales capres ini yang saling menyerang pribadi hanya karena marah capresnya diejek oleh sales lain. Pihak sebelah sini menyebut sebelah sana cebong dan pihak sebelah sana menyebut sebelah sini kampret.

Saya pribadi bingung menyaksikan fenomena sales capres ini. Masing-masing mereka menganggap capres dan cawapresnya sebagai paling hebat, paling mengerti Indonesia, paling milenial, paling cerdas, paling paham agama dan paling ganteng. Mereka larut dalam imajinasi dan halusinasi masing-

masing seolah para capres dan cawapres akan mengubah nasib mereka dalam sekejap dan membangun surga ketika mereka nantinya terpilih.

Berbeda dengan para tim sukses capres yang memang memiliki SK resmi untuk melakukan kampanye, para sales ini justru berasal dari individu yang tidak memiliki ikatan apa pun dengan partai politik, apalagi dengan capres. Tapi, semangat para sales capres ini tampak melebihi para tim sukses.

Sebagian dari sales capres ini menghabiskan energi pagi petang, siang malam tanpa berpikir tentang nasib dirinya. Bahkan mungkin sebagian mereka telah lupa apakah stok beras di rumah masih tersedia; apakah cabai, bawang, tomat, garam, gula dan ikan asin masih ada; apakah susu anaknya sudah terbeli; dan apakah kebutuhan keluarganya sudah dipenuhi.

Kita semua tentu berhak prihatin menyaksikan sales capres yang menggantungkan seluruh harapannya pada capres dan melupakan nasib dirinya. Tapi, karena itu semua adalah hak mereka, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali berdoa agar kesadaran mereka segera kembali.

Tentang Penulis



Khairil Miswar lahir di Desa Cot Bada Baroh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada 24 Juli 1981. Penulis aktif menulis di beberapa media cetak lokal di antaranya Serambi Indonesia, Harian Aceh, Pikiran Merdeka, Waspada Medan dan Harian Analisa. Penulis juga menulis di beberapa media online seperti hidayatullah.com, republika.co.id, acehtrend.co dan mojok.co.

Pada tahun 2007, penulis pernah aktif di salah satu partai politik lokal di Aceh. Saat itu penulis menjadi Ketua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Bireuen dan mengundurkan diri pada 2009.

Buku “Demokrasi Kurang Ajar” adalah buku ketiga yang dihasilkan penulis. Sebelumnya, penulis sudah menerbitkan dua buku dengan judul “Habis Sesat Terbitlah Stres” dan buku “Syariat & Apa Ta’a.”

Penulis dapat dihubungi melalui email: khairilmiswar@yahoo.com, FB: Khairil Miswar, Twitter: [@khairilmiswar1](https://twitter.com/khairilmiswar1) dan WA: 081360660766.